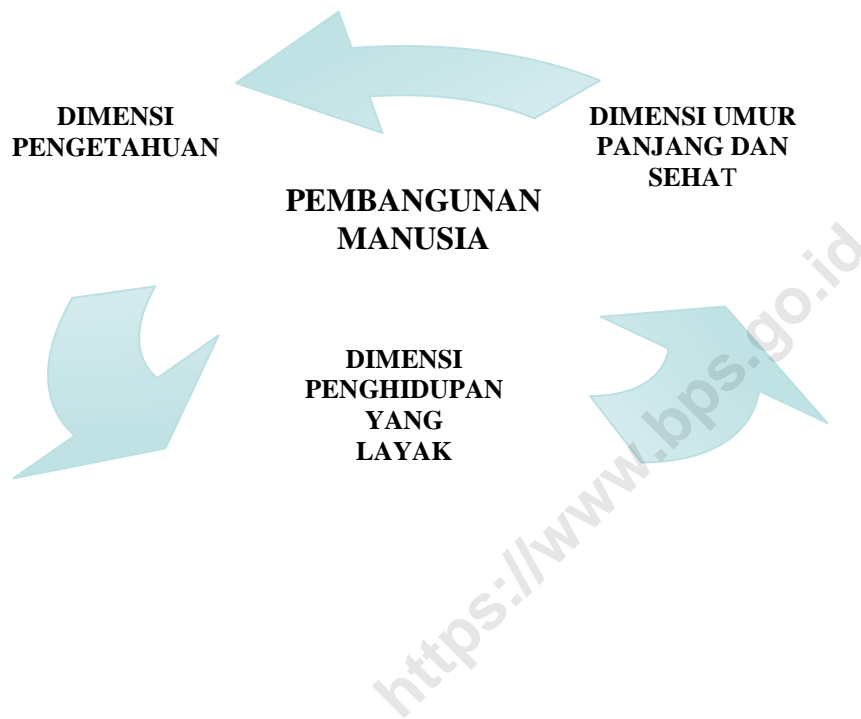


Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006



BADAN PUSAT STATISTIK – JAKARTA
2007

Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006

ISBN:
Nomor Publikasi:
Katalog BPS:

Ukuran buku: 18,5 x 23,5 cm
Jumlah halaman: 44 halaman

Naskah:
Subdit Analisis Konsistensi Statistik

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:
CV. NARIO SARI

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006

Editor:

Dr. Sunaryo Urip
Drs. Razali Ritonga, MA

Penulis:

Sunarno, SSi

Pengolah Data:

Sunarno, SSi
Sudarti, SSi
Diana Aryanti, SP

Penyiapan Naskah:

Diana Aryanti, SP

<https://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia merupakan proses agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga (3) dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah; dan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli, yang kesemuanya terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka IPM.

Buku laporan berjudul "Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006" merupakan terbitan seri kedua yang menyajikan angka IPM tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Penyajian angka IPM menurut daerah, memungkinkan setiap provinsi, kabupaten dan kota mengetahui peta perkembangan pembangunan manusia dari pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan mengetahui peta perkembangan pembangunan manusia di semua daerah, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapabilitas dasar penduduk.

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku laporan ini dapat diselesaikan. Semoga buku laporan berjudul "Indeks Pembangunan Manusia 2005-2006" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka perbaikan.

Jakarta, November 2007

Badan Pusat Statistik
Kepala,

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
1.4 Sumber Data	3
BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN	5
2.1 Pengertian.....	5
2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5
2.2.1 Umur Harapan Hidup	5
2.2.2 Tingkat Pendidikan	6
2.2.3 Standar Hidup Layak	6
2.3 Penyusunan Indeks	7
BAB III HASIL-HASIL IPM	11
3.1 Perkembangan IPM	11
3.2 Perkembangan Komponen IPM	14
3.2.1 Angka Harapan Hidup	15
3.2.2 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah	16
3.2.3 Daya Beli.....	18
BAB IV DISPARITAS ANTAR WILAYAH	21
4.1 Capaian IPM Provinsi	21
4.1.1 Status Pembangunan Provinsi	24
4.2 Capaian IPM Kabupaten dan Kota.....	26
4.2.1 Status Pembangunan Kabupaten dan Kota	28
4.3 Disparitas Pembangunan Manusia	29
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN TABEL	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM.....	8
Tabel 2.2	Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)	9
Tabel 4.1	Status Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota 2005-2006	25
Tabel 4.2	Provinsi yang Mencatat Kemajuan Pesat Selama 2005-2006	26
Tabel 4.3	Kabupaten dan Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah 2005 dan 2006	27
Tabel 4.4	Kabupaten dan Kota yang Mencatat Kemajuan Pesat Selama 2005-2006	29
Tabel 4.5	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur 2006	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkembangan IPM, 1996-2006	12
Gambar 3.2	Perkembangan Komponen IPM, 2005-2006	14
Gambar 3.3	Perkembangan Angka Harapan Hidup, 1996-2006	15
Gambar 3.4	Perkembangan Angka Melek Huruf, 1996-2006.....	17
Gambar 3.5	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah, 1996-2006	18
Gambar 3.6	Perkembangan Daya Beli Penduduk, 1996-2006.....	19
Gambar 4.1	Provinsi dengan IPM Tertinggi dan Reduksi <i>Shortfall</i> , 2005-2006	22
Gambar 4.2	Provinsi dengan IPM Terendah dan Reduksi <i>Shortfall</i> , 2005-2006	23
Gambar 4.3	Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2006.....	24
Gambar 4.4	Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur dalam IPM, 2006	30
Gambar 4.5	Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/ Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara parsial, keberhasilan kinerja pembangunan dapat dinilai seberapa besar persoalan yang paling mendasar dapat diatasi, seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian secara parsial itu bisa bervariasi, beberapa aspek berhasil dan beberapa aspek lainnya gagal. Lantas bagaimana menilai secara keseluruhan?

Persoalan ini menjadi *concern* bagi para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran dapat digunakan namun barangkali tidak standar karena tidak bisa dibandingkan antar daerah atau negara. Maka, badan persatuan bangsa-bangsa menetapkan suatu ukuran standar, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index (HDI)*. Indeks ini dibentuk dari empat indikator, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Dengan begitu luasnya cakupan dari pembangunan manusia, maka peningkatan dari IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan diperlukan untuk menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Diketahui, beberapa faktor penting dari hasil pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka bangsa itu akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih maju.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia, antara lain dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Pemerintah saat ini tampaknya sangat *concern* dengan pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, daerah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meski demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini, khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil

pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisa IPM selama 2005-2006. Data IPM secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran. Untuk melihat perkembangan IPM juga digunakan data IPM pada tahun sebelumnya, khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, publikasi ini juga akan menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM. Selanjutnya, akan diulas disparitas IPM antar daerah.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan:

1. Menyajikan perkembangan IPM secara nasional dan komponennya.
2. Menyajikan analisis perkembangan IPM antar provinsi dan kabupaten/kota, maupun komponennya.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini ditulis atas empat bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II, menguraikan tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan hasil-hasil analisis IPM dan perkembangan komponennya. Kemudian, Bab IV menguraikan disparitas IPM antar daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah Susenas kor, Susenas modul, dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas kor digunakan untuk menghitung tiga indikator pembentuk IPM. Ketiga indikator tersebut adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), Angka Harapan Hidup (eo). Sedangkan

indikator lainnya adalah daya beli atau PPP (*purchasing power parity*). Untuk indikator ini data yang digunakan adalah Susenas modul Konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi (lihat Tabel 2.2).

<https://www.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI PENGHITUNGAN

2.1 Pengertian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen; yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (*lihat diagram*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*).

2.2.1 Umur Harapan Hidup

Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk

menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara didunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2.2.2 Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, dipakai 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.2.3 Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik

Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z)^{1/3} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{1/4} && \text{Jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z
 \end{aligned}$$

Dimana

- $C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
 Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari

Penghitungan indeks daya beli, seperti terlihat pada Tabel 2.1 dan diagram penghitungan IPM, terlihat bahwa batas atas penghitungan digunakan batas maksimum dan minimum adalah sebesar Rp 732.720,- dan Rp 300.000,- ini merupakan batas sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 2002, batas bawah penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000,- mengikuti kondisi pasca krisis ekonomi.

2.3 Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan sebagai berikut;

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum dari X_i

Untuk menghitung indeks rangkuman batas minimum dan maksimum setiap komponen IPM sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732,720 ^a	300,000 (1996)	UNDP menggunakan PDB Riil disesuaikan
		360,000 ^b (1999,2002)	

Keterangan : ^{a)} Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

^{b)} Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{(i,j)}$$

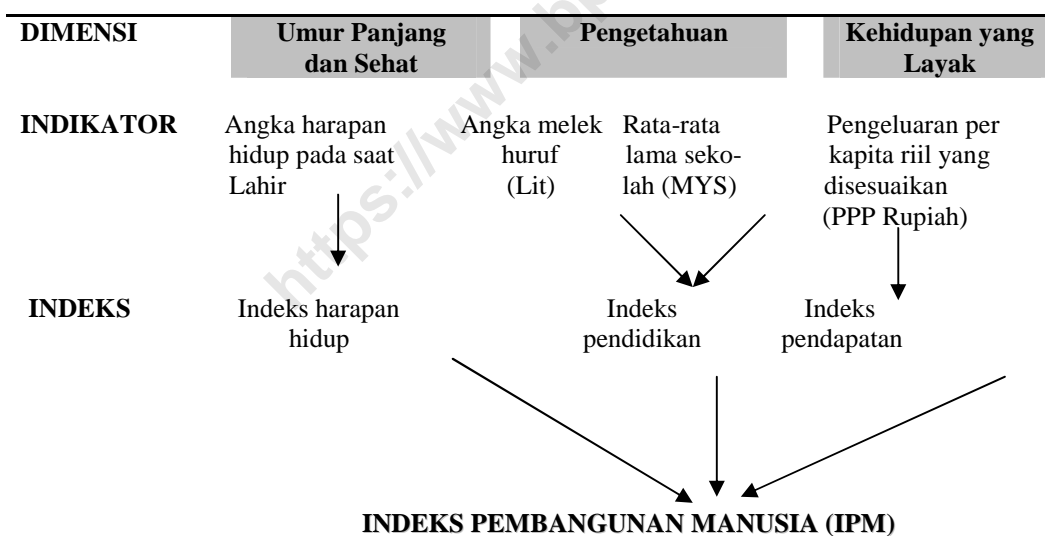
Dimana :

Indeks $X_{(i,j)}$ = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke j;

i = 1, 2, 3

j = 1, 2 k wilayah

Diagram Penghitungan IPM



Dari diagram diatas terlihat bahwa untuk menghitung IPM, terlebih dahulu dihitung Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Penghitungan masing-masing indeks dilakukan seperti penjelasan terdahulu.

Tabel 2.2 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)	Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
			lanjutan		
1. Beras Lokal	Kg	7,25	15. Pepaya	Kg	0,18
2. Tepung terigu	Kg	0,10	16. Kelapa	Butir	0,56
3. Singkong	Kg	0,22	17. Gula	Ons	1,61
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50	18. Kopi	Ons	0,60
5. Teri	Ons	0,32	19. Garam	Ons	0,15
6. Daging sapi	Kg	0,78	20. Merica	Ons	0,13
7. Ayam	Kg	0,65	21. Mie instan	80 Gram	0,79
8. Telur	Butir	1,48	22. Rokok kretek	10 batang	2,86
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48	23. Listrik	Kwh	2,06
10. Bayam	Kg	0,30	24. Air minum	M3	0,46
11. Kacang panjang	Kg	0,32	25. Bensin	Liter	1,02
12. Kacang tanah	Kg	0,22	26. Minyak tanah	Liter	1,74
			27. Sewa Rumah	Unit	11,56
			Total		37,52

<https://www.bps.go.id>

BAB III

HASIL - HASIL IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar. Angka IPM kurang memiliki makna apabila dalam analisis tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya atau daerah lainnya sehingga akan dapat diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar daerah.

Data IPM menjadi sangat penting bernilai strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dimana salah satu alokatornya adalah IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia.

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM secara nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota berikut komponennya.

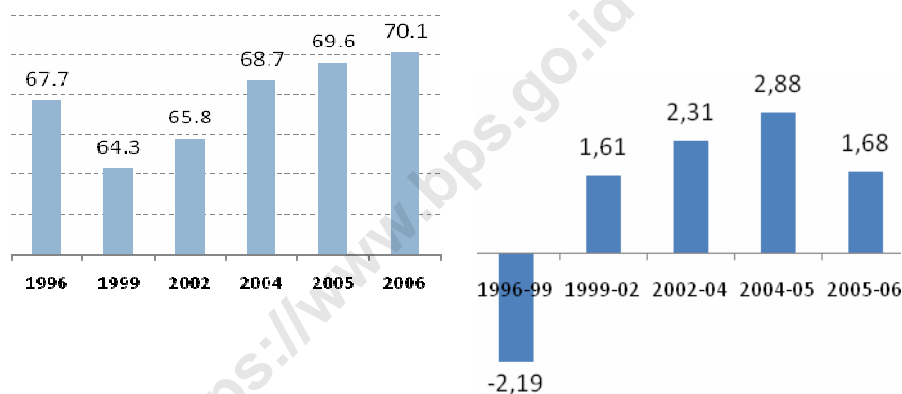
3.1 Perkembangan IPM

Secara umum pembangunan manusia di Indonesia selama periode 1996-2006 mengalami peningkatan. Namun pada periode 1996-1999 mengalami penurunan. Hal ini terkait erat dengan situasi perekonomian negara yang memburuk sebagai dampak krisis ekonomi. Pada tahun 1996, setahun sebelum krisis IPM Indonesia mencapai angka 67,7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Cambodia, dan Myanmar. Namun, sejak krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, IPM Indonesia bergerak turun menjadi 64,3 pada tahun 1999, sehingga peringkat Indonesia turun ke urutan ke 110 dari 177 negara yang sebelumnya diperingkat 99 (UNDP, 2004).

Perkembangan selanjutnya menunjukkan peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian negara, IPM secara perlahan bergerak naik mencapai 65,8 pada tahun 2002 tetapi kenaikan ini masih belum mampu melampaui IPM tahun 1996. Pada tahun 2006, IPM naik mencapai 70,1 (lihat Gambar 3.1).

Kondisi terkini, berdasarkan laporan *United Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 2006 peringkat IPM Indonesia meningkat lagi menempati urutan ke 108 dari 177 negara. Urutan ini masih lebih baik dibandingkan lima negara ASEAN seperti Vietnam (109), Cambodia (129), Myanmar (130), Laos (133) dan Timor Timur (142). Tetapi urutan ini berada di bawah lima negara ASEAN lainnya seperti Singapore (25), Brunei Darussalam (34), Malaysia (61), Thailand (74) dan Philipina (84). Dengan demikian, kualitas hidup penduduk Indonesia yang tercermin dari angka IPM di wilayah ASEAN belum menggembirakan.

Gambar 3.1 Perkembangan IPM, 1996-2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Pola perkembangan IPM selama periode 1996-2006 menunjukkan adanya pengurangan jarak IPM terhadap nilai idealnya (100) yang direpresentasikan dengan ukuran reduksi *shortfall*. Seperti yang terlihat pada gambar 3.1, reduksi *shortfall* pada periode 1996-1999 bernilai minus 2,19, artinya bahwa selama periode tersebut IPM semakin menjauh dari nilai idealnya yang berarti kualitas hidup penduduk pada

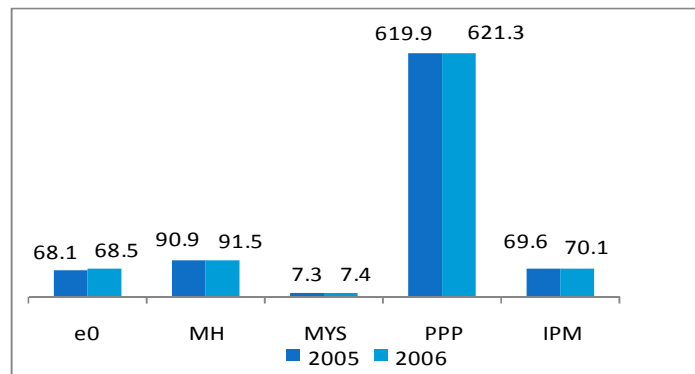
periode tersebut memburuk. Kemudian pada tiga periode berikutnya (1999-2002, 2002-2004, 2004-2005) reduksi *shortfall* secara perlahan meningkat hingga menjadi 2,88. Tetapi pada periode 2005-2006 reduksi *shortfall* kembali menurun menjadi 1,68. Hal ini memberi indikasi meski kualitas penduduk sudah semakin membaik, namun pada periode 2005-2006 peningkatan kualitas hidup penduduk capaiannya menunjukkan pelambatan.

Perkembangan IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih kombinasi IPM selama periode 2005-2006. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/rate dari komponen IPM angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Adapun perubahan dari masing-masing komponen ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor.

Selama periode 2005-2006 IPM menunjukkan perkembangan peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang tercermin adanya peningkatan komponen IPM. Konkretnya, indikator harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita sebagai komponen dasar IPM semuanya meningkat. Peningkatan komponen IPM secara berurutan dari yang tertinggi ialah rata-rata lama sekolah; yaitu sebesar 1,37 persen poin per tahun, berikutnya angka melek huruf meningkat sebesar 0,61 persen poin per tahun. Angka harapan hidup dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masing-masing meningkat sebesar 0,56 persen poin dan sebesar 0,21 persen poin per tahun.

Disadari, memang tidak mudah untuk meningkatkan komponen IPM seperti angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah karena harapan hidup sangat tergantung dari angka kematian dalam periode tertentu. Dalam jangka waktu satu tahun angka harapan hidup kenaikannya tidak lebih dari 1 poin, itupun jika tidak ada kematian. Sementara rata-rata lama sekolah tergantung dari partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Jadi, yang paling memungkinkan untuk mempercepat laju IPM adalah dengan meningkatkan kemampuan daya beli penduduk (Razali, opini Kompas).

Gambar 3.2 Perkembangan Komponen IPM, 2005-2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Diketahui, IPM dibentuk oleh empat komponen; yaitu harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Terkait dengan ini, menarik untuk diketahui seberapa besar setiap komponen berkontribusi terhadap besaran angka IPM. Informasi ini sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi setiap komponen IPM terhadap besaran angka IPM digunakan teknik regresi yang diperoleh dari koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil regresi diperoleh komponen IPM yang mempunyai kontribusi terbesar adalah rata-rata lama sekolah, yakni sebesar 73 persen per tahun, berikutnya melek huruf 64 persen per tahun. Adapun harapan hidup dan pengeluaran riil per kapita masing-masing sebesar 47 persen per tahun dan 40 persen per tahun.

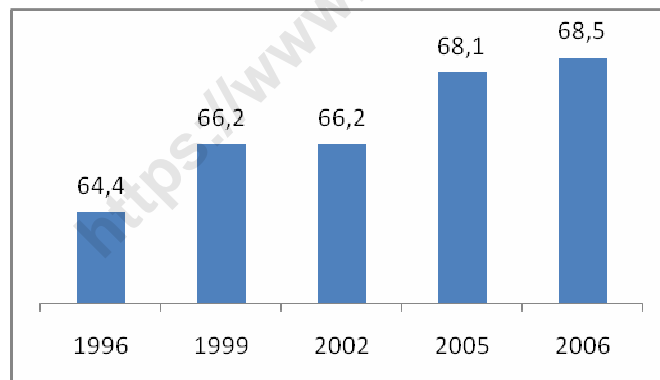
3.2 Perkembangan Komponen IPM

Secara umum perkembangan komponen IPM yang meliputi peningkatan dan kontribusi setiap komponen terhadap IPM telah disinggung pada subbab 3.1. Pada subbab berikut ini perkembangan komponen IPM dibahas secara terpisah.

3.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.3 memperlihatkan perkembangan AHH selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat, selama periode 1996-2006 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1996 sebelum krisis, AHH penduduk telah mencapai 64,4 tahun. AHH ini masih lebih baik dibandingkan dengan AHH Laos PDR, Cambodia dan Myanmar. Namun, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, AHH Indonesia masih tertinggal (ASEAN, 2005). Perkembangan selanjutnya, meski mengalami krisis ekonomi sejak pertengahan 1997, AHH Indonesia pada tahun 1999 meningkat sebesar 1,8 poin tahun sehingga menjadi 66,2 tahun. Namun, pada tahun 2002 AHH tidak menunjukkan peningkatan. Tiga tahun kemudian pada tahun 2005 AHH menunjukkan perkembangan meningkat mencapai 68,1 pada tahun 2006

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup, 1996-2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Angka harapan hidup di tingkat provinsi relatif bervariasi antara 73,0-60,9 tahun dimana Yogyakarta mempunyai angka harapan hidup tertinggi sedangkan Nusa Tenggara Barat yang terendah. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menempati urutan kedua dengan angka harapan hidup sebesar 72,6 tahun dan berikutnya angka harapan hidup Sulawesi Utara sebesar 71,8 tahun. Sementara itu urutan terendah kedua adalah Kalimantan Selatan dengan angka harapan hidup sebesar 62,4 tahun, kemudian Banten di urutan ketiga terendah dengan angka harapan hidup sebesar 64,3 tahun. Namun demikian, secara umum angka harapan hidup penduduk seluruh provinsi berada diatas 60 tahun.

3.2.2 Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

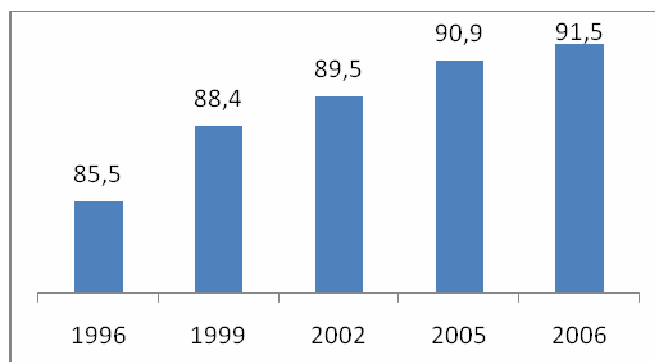
Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini juga dapat dimaknai sebagai ukuran sumber daya manusia.

Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 1996-2006 menunjukkan perkembangan meningkat. Peningkatan yang cukup cepat terjadi pada periode 1996-1999, yaitu sebesar 2,9 persen poin menjadi 88,4 persen pada 1999 meningkat dari 85,5 persen pada tahun 1996. Meski terjadi krisis pada periode tersebut, tampaknya tidak berpengaruh terhadap perkembangan AMH.

Periode berikutnya perkembangan AMH mulai melambat, perkembangan AMH pada periode 1999-2002 hanya meningkat sebesar 1,1 persen poin. Bahkan pada periode 2002-2005 perkembangan AMH hanya sekitar 0,4 persen poin. Tetapi pada periode 2005-2006 meningkat menjadi 0,7 persen lebih tinggi sedikit dibandingkan periode 2002-2005 (lihat Gambar 3.4).

Secara umum peningkatan kemampuan baca tulis penduduk usia 15 tahun ke atas selama periode 1996-2006 cukup menggembirakan, meski masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN kecuali Laos PDR dan Kamboja.

Gambar 3.4 Perkembangan Angka Melek Huruf, 1996-2006

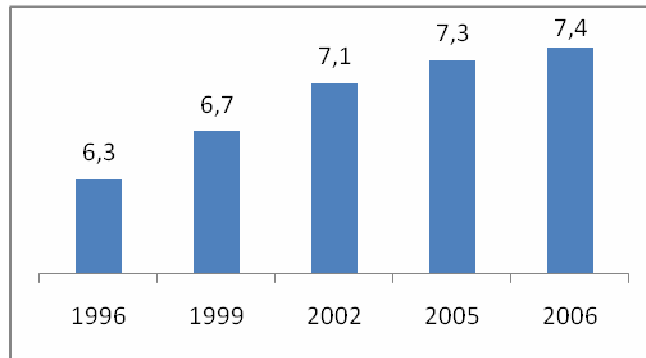


Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti, dari 6,3 tahun pada tahun 1996 menjadi 7,4 tahun pada tahun 2006 atau naik sebesar 1,1 tahun selama periode 1996-2006. Berarti tingkat pendidikan penduduk Indonesia baru setara dengan tingkat sekolah dasar pada tahun 1996, meningkat menjadi setara dengan kelas satu sekolah tingkat menengah pada tahun 2006. Tampaknya kenaikan rata-rata lama sekolah secara umum relatif lambat. Dari periode 1996-2006 kenaikan rata-rata lama sekolah tidak lebih dari 0,4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

Gambar 3.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah, 1996-2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk di Indonesia relatif tertinggal. Perlu kerja keras untuk mengejar ketertinggalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP (15 tahun atau setara dengan sekolah menengah). Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya bersekolah, perlu terus disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas.

Di tingkat provinsi, DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan provinsi lainnya; yaitu sebesar 10,8 tahun. Berikutnya Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara masing-masing 8,8 tahun. Provinsi Yogyakarta yang merupakan kota pelajar hanya di urutan 9 dengan rata-rata lama sekolah 8,5 tahun. Sedangkan Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur masing-masing di urutan terendah pertama, kedua dan ketiga dengan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 6,3 tahun, 6,3 tahun dan 6,4 tahun.

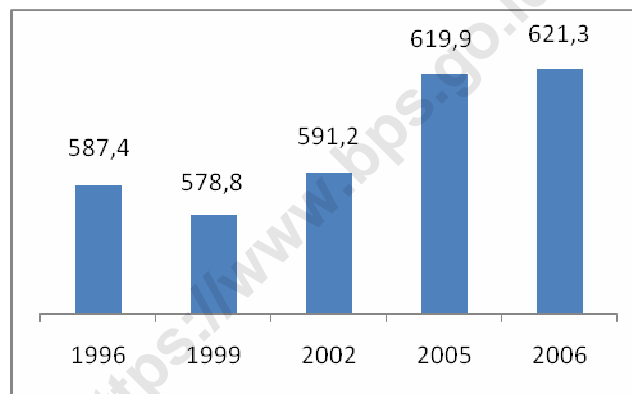
3.2.3 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar

wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding, untuk itu perlu dibuat standarisasi. Misal, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standarisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 3.6, kemampuan daya beli masyarakat tampaknya terus meningkat. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2002 hingga tahun 2006 meski dari kenaikan nominalnya tidak besar. Selanjutnya, setelah tahun 2002 daya beli masyarakat berangsur-angsur meningkat, terutama pada periode 2002-2005 yang cukup pesat. Namun pada periode berikutnya 2005-2006 kemampuan daya beli masyarakat tampak melambat menjadi 621,3.

Gambar 3.6 Perkembangan Daya Beli Penduduk, 1996-2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Dalam perkembangannya daya beli masyarakat selama periode 1996-2006 pernah mengalami penurunan, yaitu ketika krisis. penurunan daya beli terlihat sebagaimana gambar 3.6 yang menunjukkan bahwa pada tahun 1999 daya beli masyarakat turun menjadi Rp.578,8 ribu dari Rp.587,4 ribu tahun 1996. Kemudian,

sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian negara, secara perlahan daya beli masyarakat meningkat dan tahun 2006 mencapai Rp 621,3 ribu.

<https://www.bps.go.id>

BAB IV DISPARITAS ANTAR WILAYAH

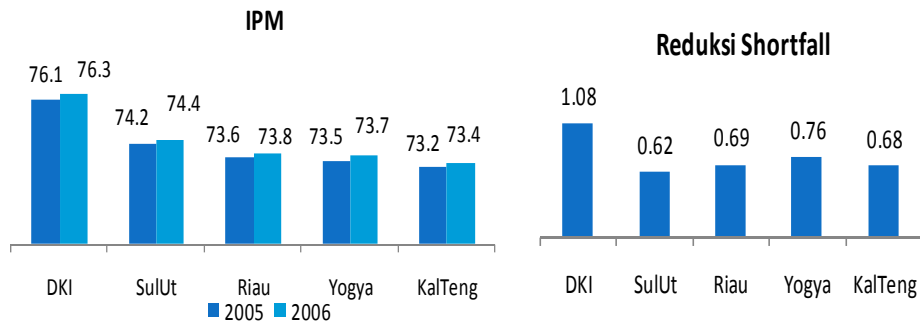
4.1 Capaian IPM Provinsi

Secara umum, IPM provinsi menggambarkan kinerja pembangunan manusia pada tingkat provinsi. Kinerja pembangunan manusia bisa dinilai berhasil atau gagal berdasarkan capaian angka IPM. Selanjutnya, capaian angka IPM itu akan menentukan urutan (ranking) suatu daerah. Untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia, barangkali tidak mutlak dari urutan posisi (ranking), akan tetapi berdasarkan reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia.

Selama sepuluh tahun terakhir IPM provinsi di Indonesia menunjukkan perkembangan meningkat. Seperti pada tahun sebelumnya DKI Jakarta selalu tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yang mencapai 76,3 pada tahun 2006. Kemudian Sulawesi Utara dengan IPM tertinggi kedua, yaitu sebesar 74,4 dan berikutnya berturut-turut adalah Riau (73,8) dan Yogyakarta (73,7) (lihat Gambar 4.1). Berdasarkan historinya kelima provinsi ini selalu tercatat sebagai provinsi yang terbaik dalam pembangunan manusia. Sedangkan Papua merupakan provinsi dengan pencapaian IPM yang terendah, yaitu sebesar 62,8. Selanjutnya provinsi yang memiliki IPM terendah berikutnya berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (63,0), Nusa Tenggara Timur (64,8) dan Papua Barat (66,1). Sementara itu provinsi Sulawesi Barat berada di urutan terendah kelima dengan IPM 67,1 (lihat Tabel 4.2).

Meskipun provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat merupakan provinsi dengan IPM terendah, tetapi dari perkembangan IPM keempat provinsi tersebut menunjukkan peningkatan. Hanya saja dari segi kecepatan, peningkatan IPM provinsi tersebut tidak secepat peningkatan IPM provinsi lainnya.

Gambar 4.1 Provinsi dengan IPM Tertinggi dan Reduksi *Shortfall*, 2005-2006

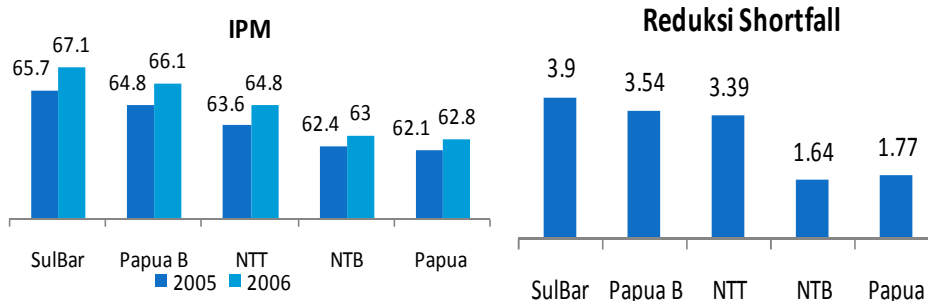


Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Laju kecepatan peningkatan IPM masing-masing provinsi berbeda. Kecepatan peningkatan IPM ini sangat tergantung dari tinggi rendah angka IPM yang dicapai. Sebagai ilustrasi, provinsi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM dengan angka IPM yang tergolong tinggi (*hardrock*). Sebaliknya, sangat mudah bagi provinsi yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (*softrock*). Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4.1, semua provinsi yang tergolong lima besar IPM tertinggi memiliki reduksi *shortfall* relatif kecil. Hal ini terkait dengan angka IPM yang tergolong tinggi sudah diatas 70-an.

Sebaliknya provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Sulawesi Barat yang memiliki reduksi *shortfall* relatif tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan angka IPM kelima provinsi tersebut tergolong rendah di sekitar 60-an.

Gambar 4.2 Provinsi dengan IPM Terendah dan Reduksi *Shortfall*, 2005-2006

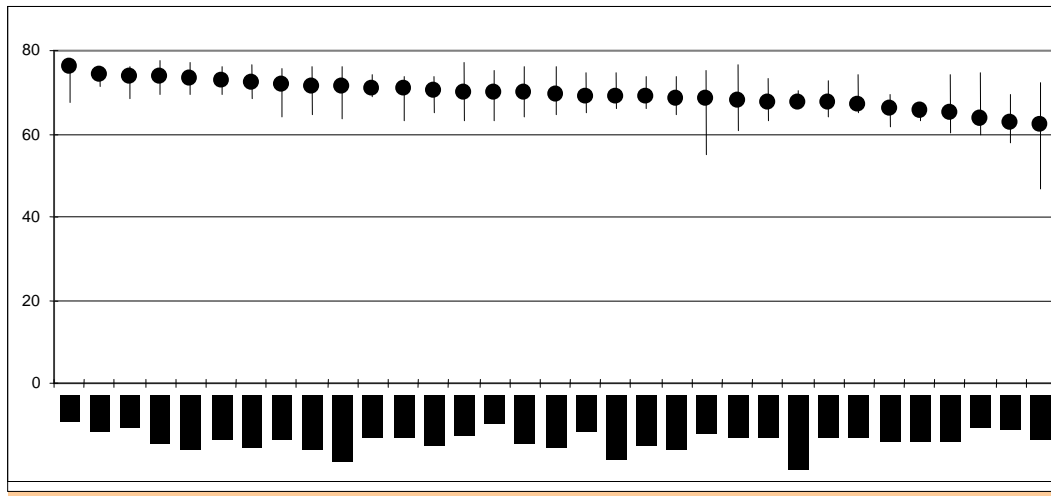


Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Rata-rata nilai IPM untuk nasional pada tahun 2006 sebesar 70,1. Angka ini menutupi variasi nilai IPM antar provinsi, padahal terdapat perbedaan pencapaian IPM. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 13,6 poin dengan rentang 76,3 untuk DKI Jakarta dan 62,8 untuk Papua. Dibandingkan dengan tahun 2005 perbedaan pencapaian ini relatif lebih rendah (14 poin). Artinya ada kemajuan selama periode 2005-2006 dalam pencapaian IPM dari provinsi yang memiliki urutan terendah, sementara itu peningkatan IPM dari provinsi memiliki urutan tertinggi peningkatannya cenderung lambat.

Dilihat dari sebaran IPM menurut provinsi seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 bahwa sebaran IPM hampir di semua provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa provinsi seperti Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat. Hal ini mengindikasikan pencapaian IPM dalam provinsi (baca:kabupaten/kota) bersangkutan sebarannya sangat beragam (lihat Gambar 4.3). Sebagai ilustrasi di provinsi Jawa Timur, kabupaten dengan pencapaian IPM terendah adalah di wilayah tapal kuda, sedangkan wilayah tengah dan utara cenderung lebih tinggi IPMnya. Sementara itu provinsi yang memiliki sebaran relatif paling homogen adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur.

Gambar 4.3 Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

4.1.1 Status Pembangunan Provinsi

Selama periode 2005-2006, IPM di semua provinsi mengalami kenaikan dengan kecepatan yang bervariasi. Ada sejumlah provinsi mengalami peningkatan IPM secara cepat, dan sebaliknya ada pula provinsi dengan peningkatan IPM relatif tidak cepat. Namun demikian, dari 33 provinsi yang dihitung tidak satupun provinsi termasuk dalam kategori tinggi, jika diukur menurut skala internasional¹.

Berdasarkan skala internasional 30 dari 33 provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori IPM menengah atas dan 3 provinsi lainnya masuk kategori IPM menengah bawah. Dibandingkan dengan IPM tahun 2005, komposisinya berubah, yaitu 28 provinsi masuk kategori IPM menengah atas dan 5 provinsi masuk kategori IPM menengah bawah. Perubahan kategori IPM selama periode 2005-2006 mengindikasikan kualitas hidup penduduk di dua provinsi mengalami peningkatan.

¹ Kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$); kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$); dan kategori rendah ($IPM < 50$)

Tabel 4.1 Status Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota, 2005-2006

Status Pembangunan	Provinsi		Kabupaten dan Kota	
	2005	2006	2005	2006
Rendah	-	-	23	6
Menengah bawah	5	3	96	73
Menengah atas	28	30	337	377
Tinggi	-	-	-	-

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Hal lain yang perlu diungkapkan dari perkembangan IPM adalah terdapat beberapa propinsi yang mengalami kemajuan cukup pesat selama 2005-2006. Kemajuan ini terlihat dari angka *shortfall* yang telah dicapai oleh provinsi yang mengalami kemajuan. Rentang *shortfall* provinsi yang mengalami kemajuan berkisar antara 2,35-3,90. Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi yang mengalami kemajuan pesat dengan *shortfall* lebih dari nilai 3 per tahun. Artinya dalam waktu satu tahun ketiga provinsi tersebut mampu mengurangi jarak dari IPM yang dicapai dengan nilai idealnya; yaitu sebesar 3 per tahun. Sementara Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, meski tergolong cepat kemajuannya, namun *shortfall* yang dicapai hanya sekitar nilai 2 per tahun.

Apabila dilihat pola dari provinsi yang mengalami kemajuan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.2, maka tampak provinsi yang memiliki IPM tinggi, *shortfall* yang dicapai cenderung rendah. Tetapi sebaliknya provinsi yang memiliki IPM rendah *shortfall* yang dicapai cenderung tinggi. Hal ini karena, apabila suatu provinsi sudah memiliki IPM tinggi, sulit untuk memaksimalkan capaian IPM tahun berikutnya. Jadi, sebenarnya yang membuat tingginya capaian *shortfall* terletak pada selisih antara IPM tahun sebelumnya dan IPM yang dicapai. Sebagai ilustrasi Capaian IPM provinsi Kepulauan Riau tergolong tinggi, yakni 72,2 pada tahun 2005 sedang pada tahun 2006 sebesar 72,8. Namun *shortfall* yang diperoleh hanya sekitar 2,02 per tahun. Sementara itu provinsi Sulawesi Barat dengan capaian IPM sekitar 65-an ternyata menghasilkan *shortfall* 3,90 per tahun atau hampir mencapai nilai 4 per tahun.

Tabel 4.2 Provinsi yang Mencatat Kemajuan Pesat selama 2005-2006

Provinsi	IPM		Reduksi <i>Shortfall</i> 2005-2006
	2005	2006	
Sulawesi Barat	65,7	67,1	3,90
Papua Barat	64,8	66,1	3,54
Nusa Tenggara Timur	63,6	64,8	3,39
Sumatera Selatan	70,2	71,1	2,90
Kalimantan Barat	66,2	67,1	2,58
Jawa Timur	68,4	69,2	2,39
Sulawesi Selatan	68,1	68,8	2,35
Kepulauan Riau	72,2	72,8	2,02

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

4.2 Capaian IPM Kabupaten dan Kota

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM provinsi, IPM kabupaten/kota juga semuanya memperlihatkan peningkatan IPM selama periode 2005-2006. Meski demikian, dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya berbeda. Ada kabupaten/kota menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, ada pula kabupaten/kota tingkat kecepatan peningkatan IPM lambat, serta ada pula yang tidak menunjukkan peningkatan (*stagnan*).

Perubahan IPM kabupaten/kota selama 2005-2006 telah menyebabkan pergeseran urutan posisi kabupaten/kota. Tabel 4.3 menyajikan urutan lima tertinggi dan lima terendah kabupaten dan kota berdasarkan IPM selama periode 2005-2006. Pada tabel tersebut memperlihatkan adanya pergeseran posisi kabupaten/kota untuk lima urutan tertinggi. Pada tahun 2006 tiga kota di DKI Jakarta; yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat termasuk kategori urutan lima besar IPM tertinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya urutan ini relatif tidak berubah, hanya pada tahun 2005 Jakarta Timur dan Jakarta Barat diurutan tiga dan empat, pada tahun 2006 bergeser ke urutan empat dan lima IPM tertinggi. Kota Depok pada tahun

2006 bergeser naik ke urutan tiga besar yang sebelumnya pada tahun 2005 di urutan ke lima. Pergeseran urutan IPM antara kabupaten/kota menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota saling berpacu dalam pembangunan manusia.

Sementara itu, pada tahun 2006 lima kabupaten urutan terbawah dengan IPM terendah; yakni Pegunungan Bintang, Mappi, Yahukimo Asmat dan Boven Digoel yang kesemuanya di propinsi Papua. Urutan ini hampir tidak bergeser dari tahun sebelumnya (2005) yang urutan sebelumnya adalah kabupaten Pegunungan Bintang, Mappi, Yahukimo, Asmat, dan Boven Digoel. Tabel 4.3 memperlihatkan pergeseran urutan posisi kabupaten di provinsi Papua selama 2005-2006.

Tabel 4.3 Kabupaten dan Kota dengan Urutan IPM Tertinggi dan Terendah, 2005 dan 2006

Tertinggi			
Tahun 2005	IPM	Tahun 2006	IPM
Kabupaten dan Kota		Kabupaten dan Kota	
Kota Jakarta Selatan	77,9	Kota Jakarta Selatan	78,3
Kota Yogyakarta	77,7	Kota Yogyakarta	77,8
Kota Jakarta Timur	77,3	Kota Depok	77,7
Kota Jakarta Barat	77,1	Kota Jakarta Timur	77,4
Kota Depok	77,1	Kota Jakarta Barat	77,4
Terendah			
Tahun 2005	IPM	Tahun 2006	IPM
Kabupaten dan Kota		Kabupaten dan Kota	
Boven Digoel	47,6	Boven Digoel	48,3
Yahukimo	47,4	Asmat	48,3
Asmat	47,2	Yahukimo	48,0
Mappi	47,0	Mappi	48,0
Pegunungan Bintang	46,9	Pegunungan Bintang	47,2

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Tabel 4.4 menyajikan kabupaten/kota yang mencatat kemajuan pesat selama 2005-2006. Pada umumnya kabupaten/kota yang mengalami kemajuan pesat adalah kabupaten/kota yang memiliki angka IPM relatif rendah. Terdapat 10 Kabupaten/kota

yang tersebar di beberapa provinsi mencatat kemajuan pesat. Kemajuan pesat ini terbagi ke dalam tiga golongan, yakni kategori kemajuan rentang 9 per tahun, rentang 7 per tahun dan rentang 6 per tahun. Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Barat dan Jayawijaya di provinsi Papua mencatat kemajuan yang tercepat dalam kategori rentang 9. Kemudian dua kabupaten mencatat kemajuan masuk dalam kategori rentang 7, yaitu masing-masing kabupaten Rokan Hilir di provinsi Riau dan Teluk Bintuni di provinsi Papua Barat. Sementara itu kabupaten yang mencatat kemajuan dalam rentang 6 terdapat 6 kabupaten, yaitu kabupaten Takalar (Sulsel), Tuban (Jatim), Indramayu (Jabar), Bangkalan (Jatim), Ogan Komering Ulu Timur (Sumsel), Melawai (Kalimantan Barat). Dibandingkan dengan tingkat kecepatan kemajuan (reduksi *shortfall*) 10 kabupaten pada periode 2004-2005, maka pada periode 2005-2006 menunjukkan tingkat kecepatan yang relatif lebih cepat, yakni berkisar antara 6,03-9,58 per tahun.

4.2.1 Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia di semua kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota, satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Kecepatan perubahan IPM selama 2005-2006 tercermin pada nilai reduksi *shortfall*. Namun demikian, apakah kecepatan perubahan tersebut dapat merubah status pembangunannya? Berdasarkan skala internasional dari 456 kabupaten/kota tidak satupun kabupaten/kota tergolong IPM tinggi. Meski demikian, IPM yang telah dicapai oleh sebagian besar (377 dari 456) kabupaten/kota di Indonesia tergolong menengah atas. Kemudian, 73 atau 16 persen kabupaten/kota tergolong IPM menengah bawah dan selebihnya 6 kabupaten/kota masih tergolong IPM rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Tolikara, Boven Digoel, Yahukimo, Asmat, dan Mappi yang kesemuanya dari provinsi

Papua. Pada tahun 2005, 6 kabupaten yang sama juga tergolong IPM rendah (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.4 Kabupaten dan Kota yang Mencatat Kemajuan Pesat Selama 2005-2006

Kabupaten dan Kota	Provinsi	Reduksi <i>Shortfall</i> 2005-06
Mamuju Utara	Sulawesi Barat	9,58
Jayawijaya	Papua	9,30
Rokan Hilir	Riau	7,21
Teluk Bintuni	Papua Barat	7,07
Takalar	Sulawesi Selatan	6,73
Tuban	Jawa Timur	6,27
Indramayu	Jawa Barat	6,23
Bangkalan	Jawa Timur	6,22
Ogan Komiring Ilu Timur	Sumatera Selatan	6,18
Melawai	Kalimantan Barat	6,03

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

4.3 Disparitas Pembangunan Manusia

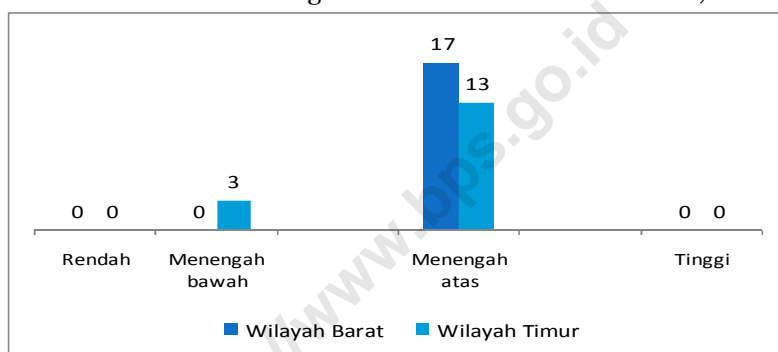
Variasi pencapaian pembangunan antar provinsi memberikan gambaran, adanya ketidakmerataan pembangunan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Keseluruhan indikator sosial dan ekonomi telah terangkum dalam IPM yang merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Gambar 4.4 memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Pada gambar tersebut terlihat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pencapaian pembangunan manusia di provinsi wilayah bagian barat semuanya telah mencapai kelompok menengah atas (66 – 80). Hal ini terlihat pada Gambar 4.4 sebanyak 17 provinsi di wilayah bagian barat tergolong pada kelompok IPM menengah atas.

Sedangkan provinsi di wilayah bagian timur sebanyak 13 provinsi yang tergolong IPM menengah atas dan selebihnya 3 provinsi di wilayah bagian timur tergolong pada kelompok IPM menengah bawah (50-66), yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Sebenarnya, pembangunan manusia di wilayah bagian timur telah menunjukkan peningkatan selama periode 2005-2006. Namun peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan wilayah bagian barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah bagian barat dengan wilayah bagian timur dapat dikurangi.

Gambar 4.4 Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur dalam IPM, 2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Di tingkat kabupaten/kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Jakarta Selatan, yaitu sebesar 78,3. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 47,2 di provinsi Papua, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Jakarta Selatan (wilayah Barat) dan Kabupaten Pegunungan Bintang (Wilayah Timur) sekitar 31,1 poin. Disparitas pencapaian IPM di kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan kabupaten dan kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan

manusia di tingkat kabupaten dan kota di wilayah barat dan wilayah timur masih timpang. Meski demikian, jika dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2005 masih lebih baik. Artinya disparitas IPM tahun 2006 sudah semakin mengecil.

Menarik untuk dicermati perbedaan urutan IPM tertinggi dan terendah di masing-masing di wilayah bagian barat maupun wilayah bagian timur. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat didominasi oleh kabupaten dan kota di provinsi Jawa. Jakarta Selatan menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 78,3, kemudian urutan berikutnya berturut-turut adalah Yogyakarta (77,8), Depok (77,7), Jakarta Timur (77,4), dan Jakarta Barat (77,4). Sedangkan Kabupaten/kota dengan IPM terendah seluruhnya di provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda; yaitu Pamekasan (62,0), Situbondo (61,8), Probolinggo (60,6) Bondowoso (60,4), dan Sampang (56,3). Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat.

Tabel 4.5 Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006

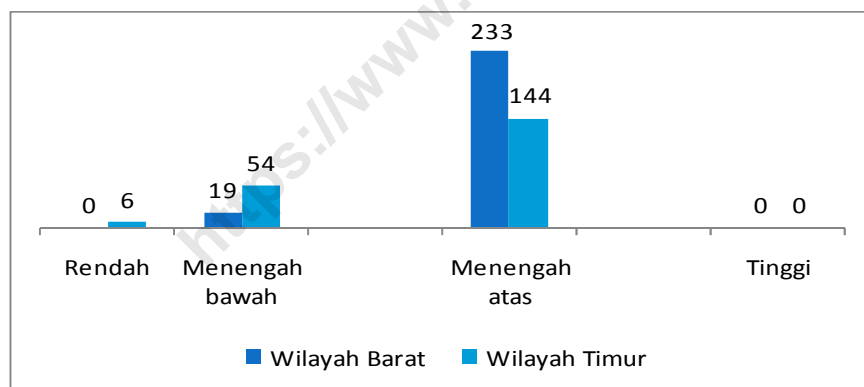
Wilayah Barat	IPM	Wilayah Timur	IPM
Tertinggi		Tertinggi	
Kota Jakarta Selatan	78,3	Kota Palangka Raya	77,1
Kota Yogyakarta	77,8	Kota Makasar	76,9
Kota Depok	77,7	Kota Ambon	76,6
Kota Jakarta Timur	77,4	Kota Manado	76,4
Kota Jakarta Barat	77,4	Kota Balikpapan	76,3
Terendah		Terendah	
Kab. Pamekasan	62,0	Kab. Boven Digoel	48,3
Kab. Situbondo	61,8	Kab. Asmat	48,3
Kab. Probolinggo	60,6	Kab. Yahukimo	48,0
Kab. Bondowoso	60,4	Kab. Mappi	48,0
Kab. Sampang	56,3	Kab. Pegunungan Bintang	47,2

Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Sementara itu, di wilayah bagian timur urutan IPM tertinggi adalah Kota Palangka Raya sebesar 77,1, kemudian kota Makasar (76,9), kota Ambon (76,6), Manado (76,4), dan kota Balikpapan (76,3). Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur urutan IPM terendah terdapat di provinsi Papua (lihat Tabel 4.5).

Ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Gambar 4.5 menyajikan status pembangunan manusia kabupaten/kota menurut wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur tahun 2006. Dari gambar tersebut masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah bagian barat, sekitar 233 kabupaten/kota memiliki status pembangunan dengan kategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$) dibanding 144 kabupaten/kota di wilayah timur. Pada kategori menengah bawah 19 kabupaten/kota wilayah bagian barat berbanding 54 kabupaten dan kota di wilayah bagian timur. Dan terdapat 7 kabupaten di wilayah bagian timur memiliki status pembangunan dengan kategori rendah.

Gambar 4.5 Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Hinde, Andrew, 1998. *Demographic Method*, Arnold, London.
- Human Development Report, 1993. New York. USA.
- Human Development Report, 1996. New York. USA.
- Human Development Report, 1997. New York. USA.
- Human Development Report, 2000. New York. USA.
- Human Development Index , 2005. New York. USA.
- H. Preston, Samuel, et.all, 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell, USA.
- Ritonga, Razali, 2006. *Indeks Pembangunan Manusia*. Kompas 20 Desember 2006. Opini halaman 4.
- Siegel, Jacob, 2002. *Applied Demographic*, Academic Press, USA.
- UNDP, BPS dan Bappenas 2001. *Laporan Pembangunan Manusia 2001:Demokrasi dan pembangunan manusia di Indonesia*, BPS–Indonesia.

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita d disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
11. Nanggroe Aceh D	68,0	68,3	8,4	8,5	96,0	96,2	588,9	589,5	69,0	69,4	18	18	1,15
01. Simeulue	62,5	62,7	6,1	6,2	94,8	98,3	603,4	606,7	65,2	66,4	361	366	3,44
02. Aceh Singkil	63,2	64,0	7,7	7,7	96,2	96,2	595,9	599,1	66,5	67,2	318	331	2,12
03. Aceh Selatan	65,7	66,5	8,2	8,2	96,4	96,4	588,7	591,8	67,7	68,4	259	276	2,08
04. Aceh Tenggara	68,9	69,1	9,3	9,3	96,9	96,9	586,0	589,1	70,2	70,6	160	178	1,16
05. Aceh Timur	69,1	69,3	8,3	8,4	97,2	97,2	569,8	572,9	68,4	68,8	238	256	1,37
06. Aceh Tengah	69,1	69,2	9,0	9,0	97,5	97,5	594,2	597,3	70,8	71,2	140	152	1,09
07. Aceh Barat	68,9	69,6	8,2	8,2	89,9	89,9	580,9	584,0	67,4	68,1	278	293	1,98
08. Aceh Besar	70,0	70,3	9,4	9,4	96,9	96,9	593,2	596,3	71,4	71,9	121	123	1,75
09. Pidie	68,4	68,7	8,5	8,6	94,5	94,5	594,9	598,0	69,5	70,0	184	198	1,55
10. Bireuen	72,2	72,2	9,1	9,2	96,8	98,3	581,6	584,7	71,5	72,2	113	106	2,39
11. Aceh Utara	69,1	69,3	9,0	9,1	94,9	96,0	587,2	590,3	69,7	70,4	180	187	2,29
12. Aceh Barat Daya	65,4	66,0	7,4	7,5	95,7	95,7	589,5	592,7	66,9	67,5	304	313	1,98
13. Gayo Lues	66,2	66,6	8,6	8,7	86,7	86,7	587,7	590,9	66,1	66,6	332	358	1,59
14. Aceh Tamiang	67,8	68,0	8,3	8,4	98,0	98,0	575,6	578,7	68,3	68,7	241	261	1,35
15. Nagan Raya	69,1	69,2	6,4	6,7	89,7	89,7	583,1	586,2	66,3	66,9	324	345	1,59
16. Aceh Jaya	67,0	67,8	8,7	8,7	89,9	91,1	581,6	584,7	66,8	67,8	307	304	2,81
17. Bener Meriah	66,4	67,2	8,0	8,1	96,4	96,4	580,9	584,0	67,4	68,1	284	292	2,34
18. Pidie Jaya		68,8		8,0		94,2		596,2		69,4		227	
71. Kota Banda Aceh	68,7	69,6	11,2	11,2	99,0	99,0	621,0	624,3	74,7	75,4	31	30	3,01
72. Kota Sabang	69,6	69,7	9,5	9,6	98,2	98,2	615,1	618,4	73,3	73,7	69	70	1,41
73. Kota Langsa	68,9	69,7	9,3	9,4	97,0	98,5	588,4	591,5	70,4	71,5	152	140	3,74
74. Kota Lhokseumawe	68,4	69,2	9,7	9,7	98,6	98,8	618,2	621,5	73,1	73,8	72	63	2,76
75. Subulussalam		65,2		7,5		96,5		599,9		67,8		303	
12. Sumatera Utara	68,7	68,9	8,5	8,6	97,0	97,0	618,0	621,4	72,0	72,5	8	8	1,55
01. Nias	68,7	68,7	6,2	6,4	87,1	89,4	591,5	592,4	66,1	66,8	333	348	2,20
02. Mandailing Natal	63,0	63,3	7,6	7,7	98,1	99,3	623,4	624,4	68,8	69,4	216	226	1,87
03. Tapanuli Selatan	66,6	66,9	8,9	8,9	99,5	99,7	624,2	625,1	72,2	72,5	89	96	1,01
04. Tapanuli Tengah	67,0	67,3	8,0	8,1	95,6	95,6	599,0	603,6	68,9	69,5	213	219	1,94
05. Tapanuli Utara	67,4	68,2	8,8	8,8	98,6	98,6	620,5	621,5	72,1	72,6	92	91	1,81
06. Toba Samosir	69,8	70,4	9,7	9,7	96,8	97,9	631,6	632,6	74,5	75,2	36	34	2,50
07. Labuhan Batu	66,8	67,6	8,2	8,3	97,9	98,4	620,3	624,3	71,1	72,0	131	112	3,15
08. Asahan	68,0	68,4	7,2	7,2	94,2	95,6	618,4	619,4	70,1	70,7	166	173	2,04
09. Simalungun	68,4	68,5	8,6	8,6	96,2	96,2	612,3	616,3	71,3	71,7	127	132	1,31
10. Dairi	66,8	67,4	8,2	8,2	95,8	97,8	618,1	618,9	70,5	71,3	148	148	2,83
11. Karo	71,7	71,8	8,9	8,9	97,2	97,4	610,1	610,3	73,5	73,5	63	73	0,21
12. Deli Serdang	68,9	69,5	8,8	8,8	97,2	97,4	618,6	623,6	72,4	73,2	83	77	2,98
13. Langkat	68,8	68,9	8,7	8,7	96,8	96,8	607,1	609,0	71,3	71,5	124	139	0,71
14. Nias Selatan	67,9	68,4	6,2	6,3	84,8	84,8	575,4	579,3	63,9	64,5	390	410	1,76
15. Humbang Hasundutan	66,8	67,5	8,6	8,6	98,2	98,2	598,5	602,4	69,8	70,5	178	185	2,27
16. Pakpak Barat	66,3	66,5	8,1	8,1	95,3	96,2	601,5	602,4	68,7	69,1	227	238	1,20
17. Samosir	68,5	69,3	9,5	9,5	96,6	96,6	613,9	614,9	72,2	72,8	87	85	1,87
18. Serdang Bedagai	68,0	68,6	8,6	8,6	96,4	96,4	613,3	613,6	71,2	71,5	129	136	1,16
19. Batu Bara		68,1		7,2		95,2		618,8		70,4		189	
71. Kota Sibolga	69,2	70,0	9,5	9,5	99,2	99,2	614,1	614,7	73,2	73,7	71	69	1,94
72. Kota Tanjung Balai	68,6	68,9	8,6	8,6	98,8	99,0	606,8	608,6	71,6	71,9	110	121	1,21
73. Kota Pematang Siantar	71,4	71,5	10,8	10,8	99,4	99,4	619,3	620,0	75,8	75,9	19	21	0,58
74. Kota Tebing Tinggi	70,3	70,8	9,7	9,8	98,5	98,5	620,9	624,8	74,3	75,0	42	39	2,77
75. Kota Medan	70,7	71,1	10,7	10,7	99,1	99,1	619,7	620,7	75,4	75,6	22	24	1,14
76. Kota Binjai	70,5	71,3	9,7	9,8	98,0	99,2	622,0	623,2	74,4	75,3	39	32	3,59
77. Kota Padang Sidempuan	68,8	69,1	9,7	9,8	99,6	99,6	615,0	616,0	73,3	73,6	68	71	1,19
13. Sumatera Barat	68,2	68,5	8,0	8,0	96,0	96,0	618,2	622,5	71,2	71,6	9	9	1,58
01. Kepulauan Mentawai	68,1	68,1	6,5	6,5	92,2	92,4	595,7	595,9	67,4	67,5	281	317	0,16
02. Pesisir Selatan	65,4	66,2	7,5	7,5	92,1	92,1	618,5	622,2	68,4	69,1	240	239	2,35
03. Solok	64,6	65,2	7,3	7,3	97,1	97,1	610,3	613,9	68,3	68,9	242	254	1,88
04. Sawah Lunto/Sijunjung	65,2	65,6	7,1	7,2	88,0	92,4	619,1	622,8	67,1	68,7	292	264	4,67
05. Tanah Datar	69,4	69,5	7,8	7,8	96,3	96,5	616,7	618,4	71,6	71,9	108	124	0,99
06. Padang Pariaman	66,3	67,2	6,9	6,9	94,4	94,4	617,3	619,3	68,8	69,5	217	220	2,20
07. Agam	67,8	68,3	8,1	8,2	96,4	97,8	618,1	618,7	71,1	71,8	133	127	2,56
08. Limapuluh Koto	66,7	67,0	7,3	7,3	98,1	98,1	597,9	599,2	68,7	69,0	225	247	0,73

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		
09. Pasaman	65,8	66,1	7,2	7,4	95,8	98,4	625,3	625,5	69,7	70,6	181	176	3,02	
10. Solok Selatan	63,2	64,1	7,2	7,4	94,4	97,2	596,9	597,8	65,8	67,1	345	334	4,00	
11. Dharmas Raya	64,1	65,0	6,8	7,2	87,7	92,6	596,9	597,6	64,5	66,4	382	365	5,49	
12. Pasaman Barat	63,8	64,1	7,2	7,9	95,7	97,8	605,4	606,0	67,0	68,3	296	287	3,70	
71. Kota Padang	69,5	69,9	10,8	10,8	99,5	99,5	638,0	638,4	76,3	76,5	10	12	0,86	
72. Kota Solok	68,6	69,0	9,8	9,8	98,5	98,5	620,6	622,4	73,4	73,8	65	64	1,43	
73. Kota Sawah Lunto	70,6	70,8	8,6	8,6	97,1	97,9	617,2	618,6	73,1	73,5	74	74	1,50	
74. Kota Padang Panjang	69,7	69,9	10,2	10,2	99,3	99,3	639,5	639,9	76,0	76,1	17	19	0,63	
75. Kota Bukit Tinggi	70,8	70,9	10,0	10,1	98,9	99,5	636,0	638,9	76,1	76,6	15	11	2,05	
76. Kota Payakumbuh	69,8	70,0	8,9	9,0	98,6	98,6	621,2	623,4	73,5	73,9	61	62	1,34	
77. Kota Pariaman	67,7	68,1	8,7	9,3	96,6	98,2	616,2	618,8	71,3	72,6	122	90	4,35	
14. Riau	70,7	70,8	8,4	8,4	97,8	97,8	623,2	625,0	73,6	73,8	3	3	0,69	
01. Kuantan Singingi	67,6	67,9	7,8	7,8	97,8	97,8	624,6	626,7	71,6	71,9	107	122	1,06	
02. Indragiri Hulu	68,2	68,4	7,3	7,3	92,8	96,7	631,3	632,9	70,9	72,0	139	111	3,95	
03. Indragiri Hilir	70,3	70,4	7,0	7,6	98,5	98,5	626,1	628,0	72,7	73,4	78	75	2,38	
04. Pelalawan	67,6	68,3	7,0	7,3	93,6	93,6	613,8	615,7	69,2	70,0	204	200	2,43	
05. Siak	70,9	71,0	8,8	8,8	94,1	98,2	627,0	628,1	73,5	74,6	62	47	3,95	
06. Kampar	67,7	67,9	7,8	8,0	98,0	98,0	625,7	626,0	71,7	72,0	99	113	1,01	
07. Rokan Hulu	66,3	67,0	7,1	7,5	96,4	97,4	625,4	625,9	70,1	71,0	165	159	3,09	
08. Bengkalis	69,7	69,9	8,6	8,6	97,3	97,3	621,5	621,7	72,9	73,1	76	80	0,55	
09. Rokan Hilir	66,6	66,9	7,0	7,2	88,8	97,4	627,1	627,9	68,6	70,9	233	161	7,21	
71. Kota Pekanbaru	70,5	70,6	11,3	11,3	99,7	99,8	621,4	623,7	75,9	76,2	18	18	1,07	
73. Kota Dumai	70,3	70,4	9,7	9,7	99,1	99,1	632,2	633,7	75,3	75,5	23	27	0,81	
15. Jambi	68,1	68,5	7,5	7,6	96,0	96,0	620,8	621,7	71,0	71,3	11	10	1,17	
01. Kerinci	70,2	70,3	7,8	8,1	96,2	97,2	619,4	619,8	72,2	72,8	88	84	2,04	
02. Merangin	67,1	67,5	6,9	6,9	96,9	96,9	617,5	619,7	69,9	70,3	176	193	1,28	
03. Sarolangun	68,6	68,8	6,6	6,9	93,7	93,7	619,8	620,0	70,0	70,3	169	191	1,07	
04. Batanghari	68,2	68,3	7,4	7,4	97,6	97,6	623,1	623,7	71,4	71,5	119	138	0,35	
05. Muara Jambi	68,5	69,0	7,1	7,1	93,9	94,5	621,1	622,2	70,4	70,9	151	162	1,62	
06. Tanjung Jabung Timur	68,9	69,0	6,2	6,2	92,4	92,4	617,6	618,6	69,4	69,5	194	222	0,44	
07. Tanjung Jabung Barat	68,8	68,9	7,5	7,5	97,9	97,9	608,0	611,3	70,7	71,1	142	157	1,07	
08. Tebo	68,1	68,6	6,5	6,8	94,9	94,9	622,8	624,0	70,1	70,7	164	172	1,97	
09. Bungo	65,7	66,1	7,4	7,4	96,1	96,1	611,5	614,8	68,8	69,3	218	232	1,56	
71. Kota Jambi	69,4	69,7	10,1	10,1	97,6	98,1	623,2	624,1	74,1	74,5	45	50	1,52	
16. Sumatera Selatan	68,3	68,8	7,5	7,6	95,9	96,6	610,3	615,3	70,2	71,1	13	13	2,90	
01. Ogan Komering Ulu	68,8	69,0	7,0	7,1	95,1	97,2	610,5	613,9	69,9	70,9	172	164	3,04	
02. Ogan Komering Hilir	66,9	67,1	6,7	6,7	94,7	94,7	613,2	615,0	68,8	69,0	221	243	0,79	
03. Muara Enim (Liot)	66,6	66,9	7,3	7,3	98,8	98,8	596,4	600,1	68,7	69,1	228	237	1,34	
04. Lahat	66,8	66,9	7,1	7,2	96,0	96,9	590,6	597,4	67,6	68,4	271	274	2,59	
05. Musi Rawas	63,2	64,0	6,9	7,0	95,5	95,5	587,1	588,1	65,0	65,6	367	388	1,78	
06. Musi Banyuasin	68,7	68,8	6,8	6,8	95,9	95,9	594,9	597,6	68,7	69,0	223	246	0,76	
07. Banyuasin	66,6	66,7	7,0	7,0	93,5	95,9	595,4	598,6	67,2	68,1	289	295	2,54	
08. Ogan Komering Ulu Selatan	68,9	69,1	6,9	7,1	93,7	97,5	599,6	601,1	68,8	70,0	219	197	3,91	
09. Ogan Komering Ulu Timur	67,8	68,1	6,5	6,8	91,2	94,5	573,9	587,5	65,4	67,5	357	315	6,18	
10. Ogan Ilir	64,8	65,1	6,6	6,6	94,2	97,2	595,0	599,7	66,0	67,2	334	327	3,58	
11. Empat Lawang		65,0		6,5		95,8		597,1		66,6		359		
71. Kota Palembang	69,9	70,2	9,7	9,9	97,7	98,6	616,8	619,5	73,6	74,3	59	54	2,91	
72. Kota Prabumulih	70,0	70,3	8,3	8,4	97,7	97,7	597,1	601,5	71,1	71,7	132	130	2,00	
73. Kota Pagar Alam	69,2	69,3	8,0	8,4	97,2	97,4	591,5	601,3	69,9	71,1	173	155	3,74	
74. Kota Lubuk Linggau	64,7	65,1	7,6	7,8	95,0	98,0	587,4	595,3	66,3	68,0	325	298	4,87	
17. Bengkulu	68,8	68,9	8,0	8,0	94,7	94,7	617,1	618,7	71,1	71,3	10	11	0,66	
01. Bengkulu Selatan	66,6	66,8	7,6	7,6	94,7	94,7	621,8	622,0	70,0	70,1	170	195	0,39	
02. Rejang Lebong	65,2	65,8	7,3	7,6	94,8	94,8	608,0	611,7	67,9	68,8	256	260	2,61	
03. Bengkulu Utara	68,7	68,8	7,1	7,1	91,6	91,6	618,1	618,6	69,8	69,9	179	205	0,30	
04. Kaur	65,7	66,0	7,5	7,5	94,3	94,3	597,1	597,4	67,4	67,6	283	312	0,57	
05. Seluma	63,9	64,7	7,3	7,3	93,8	93,8	564,5	576,3	63,6	65,0	395	405	3,67	
06. Mukomuko	66,9	67,2	7,0	7,0	90,8	93,4	607,3	609,1	67,7	68,6	262	269	2,71	
07. Lebong	64,3	65,1	7,1	7,2	94,3	94,5	598,9	606,5	66,5	67,6	317	311	3,35	
08. Kepahiang	62,5	63,0	6,9	7,0	92,8	95,1	583,2	592,2	63,8	65,3	393	394	4,27	

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
71. Bengkulu	69,7	69,9	10,7	10,7	99,1	99,1	638,9	639,6	76,3	76,4	11	13	0,59
18. Lampung	68,0	68,5	7,2	7,3	93,5	93,5	605,1	607,0	68,8	69,4	19	19	1,70
01. Lampung Barat	65,2	65,9	7,0	7,0	94,1	95,1	588,1	590,3	66,0	66,8	337	352	2,29
02. Tanggamus	67,7	67,7	6,5	6,8	91,2	94,3	605,0	610,6	67,7	69,0	263	245	4,21
03. Lampung Selatan	67,4	67,5	6,7	6,8	93,4	93,4	593,2	598,2	67,2	67,8	290	305	1,69
04. Lampung Timur	69,4	69,4	6,4	6,9	91,3	92,4	595,9	597,9	67,9	68,6	257	265	2,45
05. Lampung Tengah	68,5	68,6	7,2	7,2	91,7	91,7	606,3	608,7	68,8	69,1	215	241	0,76
06. Lampung Utara	66,9	67,1	7,4	7,5	95,2	95,2	594,6	598,6	68,0	68,5	252	272	1,45
07. Way Kanan	68,5	68,7	6,5	6,5	94,1	94,1	587,1	594,6	67,4	68,1	280	294	2,05
08. Tulang Bawang	67,3	67,8	6,6	6,6	93,2	93,2	602,6	604,4	67,8	68,2	258	290	1,36
71. Kota Bandar Lampung	69,3	69,4	9,6	9,6	97,9	97,9	620,8	622,7	73,5	73,8	60	67	0,92
72. Kota Metro	71,9	71,9	9,4	9,8	96,4	97,3	620,7	623,0	74,5	75,2	38	33	2,70
19. Bangka Belitung	68,1	68,3	6,6	6,9	95,4	95,4	628,0	630,2	70,7	71,2	12	12	1,71
01. Bangka	66,7	66,8	6,0	6,8	92,8	96,1	632,8	635,1	69,3	70,8	201	166	5,05
02. Belitung	68,8	68,8	6,9	7,4	95,5	96,2	620,8	623,1	70,7	71,4	143	145	2,43
03. Bangka Barat	67,1	67,3	6,1	6,2	91,6	91,6	611,3	613,5	67,6	68,0	266	297	1,10
04. Bangka Tengah	67,2	67,4	6,0	6,5	91,7	94,7	611,4	617,0	67,6	69,2	265	234	4,93
05. Bangka Selatan	66,2	66,9	5,9	5,9	89,2	92,5	567,0	568,7	63,0	64,3	405	411	3,44
06. Belitung Timur	67,6	67,9	7,0	7,1	95,4	96,5	602,9	606,1	68,8	69,5	222	223	2,32
71. Kota Pangkal Pinang	69,8	70,0	8,9	8,9	97,7	97,7	629,1	631,4	73,9	74,2	48	56	1,04
20. Kepulauan Riau	69,5	69,6	8,1	8,4	96,0	96,0	621,9	625,5	72,2	72,8	7	7	2,02
01. Karimun	69,5	69,7	7,8	7,8	95,0	95,0	620,8	623,3	71,7	72,0	101	116	1,06
02. Kepulauan Riau	69,3	69,5	7,3	7,7	92,9	92,9	623,0	626,2	70,9	71,6	137	134	2,33
03. Natuna	67,5	67,9	6,7	6,9	95,3	95,7	602,0	604,1	68,4	69,0	239	244	1,99
04. Lingga	69,2	69,6	7,1	7,2	90,9	90,9	611,6	613,7	69,4	69,9	193	207	1,51
71. Kota Batam	70,5	70,6	10,7	10,7	98,8	98,8	638,3	638,5	76,5	76,7	8	9	0,54
72. Kota Tanjung Pinang	69,1	69,4	9,2	9,2	97,3	97,3	616,5	616,8	72,7	72,9	79	83	0,70
31. DKI Jakarta	72,5	72,6	10,6	10,8	98,3	98,4	619,5	619,9	76,1	76,3	1	1	1,08
01. Kep. Seribu	69,7	70,1	6,9	7,8	96,6	97,2	570,4	578,8	67,6	69,3	267	233	5,17
71. Kota Jakarta Selatan	72,4	72,8	11,0	11,0	98,0	98,6	640,5	641,1	77,9	78,3	1	1	1,80
72. Kota Jakarta Timur	72,5	72,6	11,0	11,0	99,0	99,0	629,7	630,4	77,3	77,4	3	4	0,50
73. Kota Jakarta Pusat	71,3	71,8	10,6	10,6	98,8	98,8	630,4	631,1	76,4	76,7	9	8	1,39
74. Kota Jakarta Barat	72,6	72,8	10,7	10,7	98,2	98,2	631,4	633,9	77,1	77,4	4	5	1,21
75. Kota Jakarta Utara	72,2	72,3	9,9	9,9	98,4	98,4	624,6	627,7	75,8	76,1	20	20	1,24
32. Jawa Barat	67,2	67,4	7,4	7,5	94,6	94,9	619,7	621,1	69,9	70,3	14	14	1,28
01. Bogor	66,9	67,2	6,8	7,2	93,6	93,6	620,7	621,6	69,2	69,7	205	213	1,81
02. Sukabumi	65,7	65,8	6,2	6,3	96,6	96,6	619,8	620,7	68,7	68,9	229	253	0,58
03. Cianjur	64,5	64,6	6,1	6,4	97,1	97,1	603,0	603,9	66,8	67,1	311	336	1,03
04. Bandung	68,5	68,7	8,2	8,2	98,4	98,4	624,0	625,0	72,4	72,6	81	89	0,71
05. Garut	63,5	64,0	6,8	7,1	98,0	98,9	626,1	626,9	68,7	69,5	224	224	2,30
06. Tasikmalaya	67,0	67,1	6,7	6,8	98,3	98,8	623,6	625,9	70,4	70,9	149	163	1,44
07. Ciamis	66,5	66,6	6,6	6,9	96,3	96,7	619,7	620,8	69,3	69,8	195	210	1,47
08. Kuningan	66,9	67,0	6,5	6,8	92,6	93,6	618,2	620,1	68,5	69,2	235	236	2,17
09. Cirebon	64,6	64,8	6,1	6,1	88,2	88,5	618,1	619,9	66,0	66,3	341	367	1,05
10. Majalengka	65,1	65,3	6,1	6,7	90,9	94,8	618,3	619,5	66,9	68,4	302	278	4,59
11. Sumedang	66,9	67,0	7,1	7,2	96,7	97,4	621,8	622,9	70,2	70,6	162	179	1,26
12. Indramayu	65,1	65,2	5,0	5,5	76,0	83,8	620,5	622,6	63,0	65,3	406	399	6,23
13. Subang	68,8	68,8	6,0	6,6	87,0	92,4	620,3	621,1	68,2	69,9	245	206	5,27
14. Purwakarta	65,7	65,9	7,0	7,0	94,2	94,2	618,2	619,8	68,6	68,9	234	255	0,80
15. Karawang	65,3	65,5	6,5	6,5	86,7	88,2	618,8	620,0	66,4	66,9	322	341	1,62
16. Bekasi	68,0	68,1	8,1	8,1	92,7	92,7	619,0	621,9	70,4	70,7	150	169	1,00
17. Kab Bandung Barat		68,5		8,0		98,0		624,8		72,3		102	
71. Kota Bogor	68,3	68,5	9,6	9,6	98,6	98,7	636,0	637,3	74,3	74,6	40	46	0,92
72. Kota Sukabumi	68,2	68,4	8,8	9,0	99,1	99,6	618,0	620,7	72,4	73,0	82	82	2,14
73. Kota Bandung	69,3	69,5	10,1	10,1	99,1	99,6	621,6	622,1	74,3	74,5	43	49	1,02
74. Kota Cirebon	68,3	68,4	9,2	9,2	97,0	97,0	636,0	636,7	73,7	73,8	55	65	0,43
75. Kota Bekasi	69,1	69,4	10,0	10,0	97,7	97,7	632,4	633,1	74,6	74,8	35	42	0,96
76. Kota Depok	72,5	72,6	10,2	10,5	97,2	98,4	639,5	640,2	77,1	77,7	5	3	2,52

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita d disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
77. Kota Cimahi	68,7	68,9	9,6	9,7	99,6	99,6	613,9	614,9	73,1	73,3	73	76	0,96
78. Kota Tasikmalaya	68,3	68,4	8,4	8,4	98,8	98,8	617,6	619,3	72,1	72,3	91	104	0,68
79. Kota Banjar	65,6	65,8	7,8	7,8	96,2	96,2	615,5	617,2	69,4	69,6	191	217	0,75
33. Jawa Tengah	70,6	70,8	6,6	6,8	87,4	88,2	621,4	621,7	69,8	70,3	16	15	1,57
01. Cilacap	69,5	69,6	6,5	6,6	90,0	90,1	619,0	620,8	69,5	69,8	185	211	0,92
02. Banyumas	69,4	69,5	6,9	7,0	93,3	93,3	621,5	621,8	70,7	70,8	146	165	0,54
03. Purbalingga	68,5	69,2	6,0	6,1	93,0	93,0	620,1	621,3	69,3	69,9	198	204	1,84
04. Banjarnegara	68,2	68,4	5,8	5,8	85,0	88,2	620,8	622,7	67,3	68,3	287	289	3,03
05. Kebumen	68,7	69,1	6,5	6,5	89,4	90,4	618,9	620,8	68,9	69,5	214	221	2,05
06. Purworejo	68,9	69,5	7,0	7,3	86,9	88,9	623,0	624,1	69,1	70,2	206	194	3,49
07. Wonosobo	68,9	69,0	5,7	6,0	85,6	88,9	619,3	621,0	67,6	68,8	272	259	3,58
08. Magelang	69,7	69,9	6,7	7,1	90,5	91,3	619,1	621,5	69,9	70,6	175	175	2,46
09. Boyolali	70,0	70,1	7,1	7,1	84,5	85,1	619,5	621,4	69,0	69,4	210	228	1,18
10. Klaten	70,7	70,8	7,7	7,7	85,5	86,9	637,2	637,4	71,4	71,8	118	125	1,36
11. Sukoharjo	69,7	70,0	7,8	8,1	87,2	87,2	635,2	637,1	71,2	71,7	130	129	1,78
12. Wonogiri	71,9	72,0	6,1	6,1	79,1	82,0	631,5	633,0	69,0	69,9	208	202	2,80
13. Karanganyar	71,8	71,9	7,0	7,0	81,5	82,0	637,0	640,9	70,7	71,1	145	154	1,48
14. Sragen	71,7	71,8	5,9	6,4	73,0	76,3	620,2	620,3	66,6	67,8	315	306	3,45
15. Grobogan	68,4	69,1	6,2	6,6	86,8	90,2	614,5	616,9	67,6	69,2	270	235	4,98
16. Blora	70,9	71,0	5,9	6,0	82,3	82,4	617,0	621,0	67,9	68,4	254	275	1,55
17. Rembang	69,1	69,7	5,9	6,2	88,2	88,2	626,1	628,5	69,0	69,7	211	215	2,33
18. Pati	72,6	72,6	6,4	6,8	84,3	86,3	632,8	634,3	70,9	71,8	138	128	3,05
19. Kudus	69,2	69,4	7,3	7,8	89,5	91,8	621,6	625,6	70,0	71,3	171	149	4,53
20. Jepara	70,2	70,3	6,9	6,9	87,2	87,9	620,3	621,5	69,6	70,0	183	201	1,05
21. Demak	69,5	70,0	6,6	7,0	89,3	90,3	619,3	620,8	69,4	70,3	187	190	2,94
22. Semarang	72,1	72,2	7,0	7,1	91,6	91,7	622,9	623,8	71,9	72,2	94	107	0,95
23. Temanggung	72,0	72,1	6,5	6,7	93,2	95,9	622,2	623,4	71,8	72,7	96	86	3,20
24. Kendal	66,7	67,1	6,6	6,7	88,4	88,6	622,5	623,2	67,9	68,3	255	285	1,17
25. Batang	69,1	69,2	5,8	5,8	85,1	87,0	618,8	622,4	67,6	68,4	269	279	2,46
26. Pekalongan	67,7	67,9	6,0	6,5	86,4	89,4	630,2	630,6	68,2	69,4	248	229	3,73
27. Pemalang	66,4	66,8	5,8	6,1	85,5	87,2	620,4	622,9	66,3	67,4	327	321	3,11
28. Tegal	67,4	67,6	6,2	6,2	86,4	86,4	622,0	624,5	67,5	67,8	275	300	0,99
29. Brebes	66,3	66,5	4,9	5,5	80,1	84,3	619,7	620,0	64,3	65,9	383	381	4,36
71. Kota Magelang	69,7	70,0	10,0	10,0	94,5	97,1	638,9	639,2	74,7	75,5	32	28	3,24
72. Kota Surakarta	71,7	71,8	9,8	10,0	95,8	96,6	638,4	639,0	76,0	76,4	16	15	1,58
73. Kota Salatiga	70,3	70,6	9,5	9,5	95,2	95,2	638,0	639,5	74,8	75,1	29	38	1,13
74. Kota Semarang	71,8	71,9	9,6	9,8	95,1	95,9	633,2	636,8	75,3	75,9	24	22	2,77
75. Kota Pekalongan	69,1	69,7	8,3	8,3	94,7	95,4	622,0	624,3	71,9	72,5	95	93	2,32
76. Kota Tegal	67,9	68,0	7,8	7,8	91,4	94,9	639,0	640,9	71,4	72,4	120	98	3,40
34. Yogyakarta	72,9	73,0	8,4	8,5	86,7	86,7	638,0	638,8	73,5	73,7	4	4	0,76
01. Kulon Progo	73,1	73,2	7,7	7,8	86,5	87,5	617,9	619,7	71,5	72,0	114	115	1,78
02. Bantul	70,9	70,9	8,0	8,0	86,4	86,4	637,1	637,1	71,9	72,0	93	119	0,06
03. Gunung Kidul	70,4	70,6	7,6	7,6	84,5	84,5	614,6	615,7	69,3	69,4	199	225	0,55
04. Sleman	72,7	73,8	10,1	10,1	90,5	90,5	639,1	639,4	75,6	76,2	21	17	2,69
71. Kota Yogyakarta	72,9	73,1	10,8	10,8	97,1	97,1	639,1	639,2	77,7	77,8	2	2	0,48
35. Jawa Timur	68,5	68,6	6,8	6,9	85,8	87,1	622,2	626,0	68,4	69,2	22	20	2,39
01. Pacitan	70,3	70,4	6,1	6,6	83,9	89,2	616,3	617,3	68,1	69,8	250	212	5,28
02. Ponorogo	68,2	68,7	6,2	6,4	79,5	80,5	622,5	622,9	66,5	67,1	319	333	2,02
03. Trenggalek	70,4	70,6	6,7	7,1	90,2	92,3	619,4	621,7	70,2	71,2	163	151	3,48
04. Tulungagung	70,4	70,5	7,1	7,1	89,2	89,7	621,9	622,5	70,5	70,7	147	170	0,75
05. Blitar	69,9	70,0	6,5	7,1	86,2	91,0	638,5	640,0	70,3	72,1	156	109	5,79
06. Kediri	68,5	68,7	6,6	7,0	89,3	90,7	615,9	616,0	68,7	69,3	231	230	2,15
07. Malang	67,2	67,9	6,7	6,7	84,4	88,8	616,8	618,1	66,9	68,4	299	280	4,45
08. Lumajang	65,9	66,0	5,9	5,9	80,5	86,3	613,3	614,1	64,5	65,9	378	380	3,93
09. Jember	61,7	62,1	5,6	6,3	80,6	82,8	610,6	611,4	61,7	63,0	412	428	3,46
10. Banyuwangi	65,6	66,0	6,4	6,7	84,7	85,9	618,4	619,4	66,0	66,8	336	347	2,30
11. Bondowoso	61,5	62,0	5,2	5,2	74,3	74,3	609,6	612,3	59,9	60,4	425	440	1,15
12. Situbondo	61,8	62,5	5,2	5,4	72,6	77,0	617,0	617,6	60,2	61,8	422	436	3,90
13. Probolinggo	60,0	60,0	5,1	5,0	75,0	77,7	618,1	622,6	59,8	60,6	427	439	2,19
14. Pasuruan	62,3	62,8	6,4	6,2	85,1	88,1	617,0	621,4	64,2	65,3	388	396	3,10

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
15. Sidoarjo	69,1	69,6	9,5	9,5	97,3	97,4	630,0	633,8	74,0	74,5	47	48	2,16
16. Mojokerto	68,9	69,3	7,2	7,2	91,9	91,9	621,1	623,0	70,3	70,6	159	177	1,17
17. Jombang	69,0	69,7	7,4	7,4	88,2	89,4	618,5	620,9	69,4	70,3	188	192	2,80
18. Nganjuk	67,6	68,0	6,8	6,8	86,5	89,2	614,1	615,8	67,5	68,5	274	273	2,95
19. Madiun	67,9	68,2	6,6	6,7	83,2	85,5	616,5	616,6	66,9	67,7	301	307	2,57
20. Magetan	70,1	70,2	7,2	7,2	89,8	89,8	614,3	621,6	69,9	70,5	174	181	2,13
21. Ngawi	68,2	68,6	6,1	6,1	80,9	80,9	602,6	609,7	65,2	66,0	363	378	2,30
22. Bojonegoro	66,5	66,6	6,1	6,4	81,4	84,5	593,2	597,5	63,6	64,9	396	406	3,65
23. Tuban	66,5	66,9	5,6	6,1	79,4	84,9	611,4	616,9	64,2	66,5	386	362	6,27
24. Lamongan	67,4	67,5	6,7	6,8	84,7	85,6	613,1	616,6	66,9	67,4	305	319	1,65
25. Gresik	69,8	70,0	8,1	8,4	92,6	94,0	622,1	624,7	71,6	72,5	104	94	3,08
26. Bangkalan	62,0	62,7	5,0	5,0	74,8	82,8	611,3	615,5	60,2	62,7	421	430	6,22
27. Sampang	59,8	60,4	3,6	3,8	61,8	64,1	609,7	613,9	55,0	56,3	433	449	2,87
28. Pamekasan	62,2	62,4	5,5	5,5	79,5	79,5	611,3	612,8	61,8	62,0	411	435	0,54
29. Sumenep	63,4	64,0	4,9	4,9	73,9	78,6	617,0	623,7	61,2	63,1	417	426	4,88
71. Kota Kediri	69,3	69,5	9,2	9,2	96,8	96,8	623,8	626,7	73,2	73,6	70	72	1,39
72. Kota Blitar	71,0	71,1	9,3	9,3	95,4	96,8	639,2	640,1	75,1	75,6	27	25	1,94
73. Kota Malang	68,6	68,9	9,4	10,8	95,9	96,9	637,4	638,2	73,9	75,3	52	31	5,70
74. Kota Probolinggo	68,6	68,8	8,0	8,0	88,7	88,7	638,7	639,6	71,3	71,5	126	141	0,67
75. Kota Pasuruan	66,0	66,2	8,5	8,5	95,6	95,6	634,6	639,3	71,4	72,0	117	118	1,88
76. Kota Mojokerto	70,6	70,7	9,4	9,5	95,3	96,8	635,5	635,7	74,6	75,2	33	35	2,02
77. Kota Madiun	70,0	70,2	10,0	10,0	96,0	96,0	622,0	626,1	73,9	74,4	50	53	1,80
78. Kota Surabaya	69,5	69,8	9,7	9,7	96,5	96,5	636,0	640,2	74,6	75,1	34	37	2,01
79. Kota Batu	68,1	68,3	8,0	8,0	94,9	94,9	620,5	624,6	71,0	71,4	135	144	1,56
36. Banten	64,0	64,3	8,0	8,1	95,6	95,6	619,2	620,0	68,8	69,1	20	21	0,98
01. Pandeglang	62,7	62,8	6,4	6,4	95,5	95,5	618,3	619,2	66,8	66,9	309	344	0,31
02. Lebak	62,6	63,0	6,2	6,2	94,1	94,1	618,6	620,1	66,3	66,7	326	355	0,98
03. Tangerang	64,9	65,1	8,9	8,9	94,7	94,7	619,5	621,2	69,8	70,0	177	196	0,79
04. Serang	61,4	61,8	6,6	7,0	94,6	95,5	617,9	618,9	66,0	66,8	338	346	2,37
71. Kota Tangerang	68,0	68,2	9,8	9,8	97,2	97,2	633,8	635,9	73,9	74,1	51	58	0,95
72. Kota Cilegon	68,2	68,4	9,5	9,6	98,7	98,7	629,9	631,6	73,7	74,1	54	59	1,36
51. Bali	70,4	70,5	7,4	7,6	86,2	86,2	618,2	620,2	69,8	70,1	15	16	0,96
01. Jembrana	71,4	71,5	7,2	7,5	86,9	86,9	619,2	619,4	70,4	70,7	155	174	0,96
02. Tabanan	74,2	74,2	7,4	7,4	88,6	88,6	617,4	618,5	72,3	72,4	84	99	0,18
03. Badung	71,4	71,6	8,7	8,7	86,6	90,4	622,1	622,8	71,6	72,7	106	88	3,70
04. Gianyar	71,8	71,9	7,7	7,9	85,0	85,0	622,3	623,2	70,8	71,1	141	153	1,07
05. Klungkung	68,8	68,9	6,9	6,9	80,0	80,0	639,1	640,6	68,7	68,9	226	251	0,49
06. Bangli	71,3	71,3	6,5	6,5	81,5	82,1	620,3	621,6	68,7	68,9	230	249	0,87
07. Karangasem	67,6	67,7	5,0	5,4	70,5	72,1	623,7	627,1	63,3	64,3	399	412	2,69
08. Buleleng	68,2	68,4	6,3	6,6	87,6	87,6	618,8	619,3	68,1	68,4	251	277	1,02
71. Kota Denpasar	72,7	72,8	9,9	9,9	96,5	96,5	618,3	623,6	75,2	75,7	25	23	1,90
52. Nusa Tenggara Barat	60,5	60,9	6,6	6,7	78,8	80,1	623,2	623,9	62,4	63,0	32	32	1,64
01. Lombok Barat	58,4	59,1	5,3	5,7	73,7	73,7	606,1	609,3	57,8	58,7	432	445	2,15
02. Lombok Tengah	58,7	59,4	5,3	5,3	71,1	71,1	612,3	614,9	57,9	58,5	431	446	1,41
03. Lombok Timur	58,3	58,6	6,1	6,1	76,5	79,2	613,0	613,4	59,5	60,3	429	441	1,96
04. Sumbawa	59,5	60,3	7,1	7,1	88,7	89,6	618,1	619,3	64,0	64,8	389	408	2,03
05. Dompu	60,0	60,6	7,0	7,0	82,8	82,8	623,2	626,6	63,3	63,9	398	418	1,62
06. Bima	60,9	61,7	7,2	7,2	81,4	85,7	598,0	598,3	61,7	63,1	413	424	3,87
07. Sumbawa Barat	59,1	60,6	6,9	7,0	88,6	90,6	615,0	618,4	63,4	65,0	397	404	4,47
71. Kota Mataram	64,1	64,7	8,4	8,4	91,8	91,8	633,4	634,5	69,4	69,8	192	209	1,37
72. Kota Bima	61,9	62,5	8,3	8,8	86,2	90,0	599,3	601,0	64,2	65,9	385	379	4,77
53. Nusa Tenggara Timur	64,9	66,5	6,3	6,4	85,6	86,5	589,8	591,2	63,6	64,8	31	31	3,39
01. Sumba Barat	63,3	63,8	5,7	5,7	72,7	72,7	595,5	596,5	59,8	60,1	426	442	0,96
02. Sumba Timur	61,2	61,3	5,8	5,8	80,8	82,4	583,4	583,7	59,6	60,0	428	443	1,13
03. Kupang	64,5	64,6	5,8	6,0	83,9	86,9	582,7	585,4	62,0	63,1	409	425	2,97
04. Timor Tengah Selatan	66,2	66,3	5,7	5,9	80,7	83,2	588,7	591,1	62,7	63,6	407	421	2,43
05. Timor Tengah Utara	66,8	66,9	5,8	5,8	79,3	80,9	593,6	599,5	63,1	64,0	402	417	2,36
06. Belu	64,3	64,6	6,0	6,0	79,2	79,2	585,5	589,4	61,2	61,7	416	437	1,27
07. Alor	65,1	65,6	6,9	7,4	93,4	95,9	584,3	588,2	65,4	66,9	356	343	4,43

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita d disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006		
08. Lembata	65,8	66,1	6,1	6,3	91,3	91,3	589,2	590,8	65,1	65,6	364	389	1,34	
09. Flores Timur	66,5	66,9	6,1	6,4	83,0	88,0	602,9	604,2	64,7	66,4	372	364	4,81	
10. Sikka	67,1	67,8	6,0	6,0	86,9	90,1	587,2	588,9	64,6	65,9	376	382	3,50	
11. Ende	63,7	64,0	6,6	6,6	92,8	92,8	588,8	591,6	64,6	65,0	377	403	1,18	
12. Ngada	65,5	66,7	6,6	6,6	91,7	93,6	596,6	599,7	66,0	67,3	339	322	3,97	
13. Manggarai	66,1	66,5	6,6	6,6	90,7	91,0	585,4	587,2	65,2	65,7	359	387	1,25	
14. Rote Nda	65,8	66,4	5,6	6,2	82,1	87,5	581,4	583,9	62,1	64,3	408	413	5,74	
15. Manggarai Barat	65,4	65,6	6,2	6,2	88,6	88,7	574,0	576,1	63,2	63,5	401	422	0,78	
16. Sumba Barat Daya		62,6		5,4		71,6		595,4		58,9			444	
17. Sumba Tengah		62,1		5,2		71,4		594,0		58,4			448	
18. Nageko		63,0		6,3		92,2		597,7		64,6			409	
71. Kota Kupang	71,0	71,1	10,2	10,2	97,3	97,3	616,8	619,1	74,5	74,7	37	43	0,97	
61. Kalimantan Barat	65,2	66,0	6,6	6,7	89,0	89,0	609,6	613,9	66,2	67,1	28	28	2,58	
01. Sambas	60,1	60,3	5,9	5,9	89,5	89,5	596,2	597,0	61,9	62,1	410	434	0,56	
02. Bengkayang	68,0	68,3	5,2	6,0	85,9	86,8	591,5	592,2	64,6	65,7	375	385	3,01	
03. Landak	64,0	64,5	6,3	6,9	89,2	91,5	594,2	603,1	64,2	66,1	387	375	5,22	
04. Pontianak	66,6	67,0	6,4	6,4	89,4	89,4	609,3	609,9	66,9	67,2	300	329	0,86	
05. Sanggau	67,0	67,5	6,4	6,4	89,1	89,1	597,4	604,4	66,2	67,0	330	340	2,38	
06. Ketapang	66,5	66,6	5,7	5,7	88,4	88,7	596,9	598,2	65,2	65,4	360	392	0,58	
07. Sintang	67,4	67,5	5,7	6,2	86,2	86,2	595,8	597,2	65,1	65,7	366	386	1,66	
08. Kapuas Hulu	65,9	66,2	7,1	7,1	90,2	90,2	621,9	626,3	68,2	68,7	246	263	1,62	
09. Sekadau	67,0	67,2	6,0	6,1	87,0	89,0	585,8	588,2	64,5	65,3	380	397	2,23	
10. Melawai	67,2	67,5	5,7	6,3	84,9	90,6	583,7	588,4	63,8	66,0	392	377	6,03	
11. Kayong Utara		65,0		5,6		88,2		596,1		64,2			415	
71. Kota Pontianak	66,1	66,5	8,6	9,1	91,0	93,6	620,7	625,2	69,5	71,0	186	158	5,10	
72. Kota Singkawang	66,4	66,7	6,2	6,7	86,7	86,9	590,8	594,0	64,7	65,5	374	390	2,27	
62. Kalimantan Tengah	70,7	70,8	7,9	8,0	97,5	97,5	623,6	624,4	73,2	73,4	5	5	0,68	
01. Kotawaringin Barat	70,9	70,9	7,6	7,6	92,8	93,6	618,5	619,8	71,6	71,9	103	120	1,08	
02. Kotawaringin Timur	68,9	69,0	8,0	8,0	98,7	98,7	622,7	624,7	72,5	72,7	80	87	0,81	
03. Kapuas	70,3	70,3	7,3	7,3	93,9	94,7	624,9	627,6	71,8	72,2	98	105	1,60	
04. Barito Selatan	67,5	68,0	8,0	8,3	97,9	98,5	620,0	625,5	71,3	72,4	125	97	3,80	
05. Barito Utara	71,3	71,4	7,5	8,4	98,0	98,0	616,6	622,1	72,8	73,9	77	61	4,17	
06. Sukamara	67,2	67,6	6,8	7,0	94,7	94,8	625,9	626,2	70,0	70,4	168	186	1,50	
07. Lamandau	66,8	66,9	7,6	7,6	94,4	95,8	624,9	628,6	70,2	70,9	161	160	2,25	
08. Seruyan	67,2	67,8	7,7	7,7	99,3	99,3	615,8	618,3	70,9	71,4	136	146	1,84	
09. Katingan	67,0	67,1	7,8	7,8	99,4	99,4	621,6	623,6	71,3	71,5	123	137	0,69	
10. Pulang Pisau	66,9	67,2	7,0	7,0	91,6	93,2	625,2	626,5	69,3	69,9	200	203	1,99	
11. Gunung Mas	67,0	67,4	8,4	8,7	98,3	99,3	621,3	622,4	71,5	72,3	112	103	2,60	
12. Barito Timur	67,5	67,6	7,6	8,4	94,6	97,3	617,1	620,2	70,1	71,6	167	135	5,07	
13. Murung Raya	67,6	67,8	6,6	7,0	99,3	99,3	624,6	627,4	71,0	71,6	134	133	2,06	
71. Kota Palangka Raya	72,9	72,9	10,5	10,5	99,5	99,5	625,7	626,6	77,0	77,1	6	6	0,41	
63. Kalimantan Selatan	62,1	62,4	7,3	7,4	95,3	95,3	622,7	623,8	67,4	67,7	26	26	0,94	
01. Tanah Laut	67,2	67,4	6,0	6,5	90,7	90,7	622,5	624,0	68,3	68,8	243	257	1,75	
02. Kota Baru	63,9	64,5	7,0	7,0	94,0	94,0	639,8	641,5	69,2	69,7	203	214	1,52	
03. Banjar	63,5	64,0	7,1	7,1	96,0	96,0	620,7	628,9	68,0	69,0	253	248	2,97	
04. Barito Kuala	59,6	60,5	6,5	6,6	91,5	91,5	621,3	622,4	64,5	65,2	379	402	1,87	
05. Tapin	66,2	66,6	6,8	6,8	92,7	93,2	620,8	621,9	68,6	69,0	232	242	1,25	
06. Hulu Sungai Selatan	62,6	62,9	6,6	6,6	95,1	95,1	636,2	638,1	68,2	68,5	247	271	1,06	
07. Hulu Sungai Tengah	63,2	63,8	7,3	7,3	97,4	97,4	622,3	623,4	68,5	68,9	236	252	1,27	
08. Hulu Sungai Utara	60,8	61,5	6,4	6,8	95,9	95,9	620,8	622,0	66,0	66,8	335	349	2,28	
09. Tabalong	62,0	62,4	7,3	7,8	95,9	95,9	624,1	625,1	67,6	68,3	264	286	1,95	
10. Tanah Bumbu	63,3	63,7	6,8	6,8	93,4	93,4	623,0	625,1	67,3	67,7	285	309	1,22	
11. Balangan	60,2	61,0	6,3	6,3	94,9	94,9	606,5	607,6	64,3	64,8	384	407	1,50	
71. Kota Banjarmasin	65,6	65,7	8,8	9,3	97,6	97,9	628,8	630,0	71,5	72,0	115	110	1,99	
72. Kota Banjar Baru	66,6	66,8	9,3	9,3	97,2	97,2	638,1	638,9	73,0	73,2	75	78	0,73	
64. Kalimantan Timur	70,3	70,4	8,7	8,8	95,3	95,5	621,4	623,6	72,9	73,3	6	6	1,20	
01. Pasir	71,7	71,7	7,3	7,3	92,5	94,6	616,6	618,8	71,7	72,3	102	101	2,32	
02. Kutai Barat	69,4	69,5	6,8	7,1	88,3	91,9	618,5	621,4	69,2	70,5	202	183	4,08	
03. Kutai	67,5	67,6	8,3	8,3	96,4	96,4	620,8	622,4	71,3	71,5	128	143	0,62	

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita d disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
04. Kutai Timur	67,8	67,9	7,3	7,3	93,2	94,8	612,1	613,7	69,3	69,8	196	208	1,71
05. Berau	68,9	68,9	7,6	7,6	93,7	93,7	617,4	622,4	70,7	71,1	144	156	1,25
06. Malinau	67,8	67,9	6,7	7,4	90,1	92,3	639,4	640,3	70,3	71,5	158	142	3,93
07. Bulongan	72,2	72,2	7,3	7,3	93,6	93,6	617,8	620,3	72,3	72,5	85	95	0,77
08. Nunukan	70,5	70,6	7,4	7,4	93,3	93,3	623,0	625,8	71,7	72,0	100	114	1,02
09. Penajam Paser Utara	70,9	70,9	7,4	7,4	93,8	93,8	615,1	617,9	71,5	71,7	116	131	0,84
71. Kota Balikpapan	71,1	71,3	10,0	10,0	97,9	97,9	637,0	637,8	76,1	76,3	14	16	0,84
72. Kota Samarinda	70,0	70,4	9,7	9,7	96,6	97,0	638,6	639,4	75,1	75,5	26	29	1,51
73. Kota Tarakan	70,9	71,0	9,1	9,1	97,5	97,9	619,3	630,8	73,9	74,9	49	40	3,96
74. Kota Bontang	71,7	71,8	9,9	9,9	98,1	98,1	617,1	619,6	74,9	75,1	28	36	0,96
71. Sulawesi Utara	71,7	71,8	8,8	8,8	99,3	99,3	616,1	616,9	74,2	74,4	2	2	0,62
01. Bolaang Mongondow	70,7	70,8	7,3	7,3	98,6	98,6	605,9	606,7	71,6	71,8	105	126	0,66
02. Minahasa	71,7	71,9	8,8	8,8	99,5	99,5	612,4	613,1	74,0	74,2	46	57	0,65
03. Kep.Sangihe Talaud	71,9	72,0	7,7	7,7	98,5	98,5	616,5	620,5	73,4	73,8	64	66	1,25
04. Kepulauan Talaud	70,3	70,7	7,9	8,2	97,5	97,5	614,3	618,3	72,3	73,0	86	81	2,82
05. Minahasa Selatan	71,4	71,5	8,4	8,4	99,4	99,4	586,9	595,9	71,6	72,3	109	100	2,74
06. Minahasa Utara	71,6	71,8	8,7	9,1	99,5	99,7	609,4	611,3	73,7	74,2	56	55	2,18
07. Bolaang Mongondow Utara		69,0		7,1		98,3		605,9		70,5			184
08. Minahasa Tenggara		69,5		8,0		99,0		595,0		70,8			168
09. Kep. Siau Tagulandang Biaro		68,0		7,0		98,1		618,1		70,8			167
71. Manado	72,0	72,1	10,5	10,5	99,6	99,7	622,8	623,5	76,3	76,4	12	14	0,56
72. Kota Bitung	69,6	69,9	9,2	9,2	99,6	98,8	617,4	619,7	73,6	73,7	58	68	0,50
73. Kota Tomohon	71,6	71,7	8,8	9,6	99,6	99,8	604,0	612,0	73,3	74,7	67	44	4,96
74. Kota Kotamobago		70,9		7,5		98,9		613,5		72,6			92
72. Sulawesi Tengah	65,4	65,6	7,6	7,7	94,9	94,9	610,3	613,2	68,5	68,8	21	22	1,19
01. Banggai Kepulauan	61,5	62,1	6,8	7,0	94,9	94,9	597,5	600,3	64,7	65,4	373	393	1,97
02. Banggai	67,6	67,7	7,3	7,3	94,9	94,9	604,9	605,1	69,0	69,1	209	240	0,24
03. Morowali	64,2	64,9	7,1	7,2	94,2	94,8	612,6	615,9	67,4	68,3	282	284	2,76
04. Poso	63,3	64,1	7,5	8,3	97,3	97,9	598,3	601,7	66,8	68,3	310	288	4,43
05. Donggala	63,0	63,8	7,2	7,2	94,4	94,4	610,2	615,0	66,6	67,5	314	314	2,60
06. Toli-Toli	62,9	63,4	6,8	7,2	94,3	94,3	602,4	606,6	65,7	66,6	346	356	2,70
07. Buol	64,2	64,5	7,9	7,9	98,2	98,2	589,9	598,4	67,2	68,0	291	296	2,49
08. Parigi Moutong	63,7	63,9	6,6	7,0	89,3	91,7	611,1	612,2	65,6	66,6	352	357	3,08
09. Tojo Una-Una	62,5	63,3	7,5	7,5	97,3	97,4	592,5	597,7	65,9	66,8	343	350	2,64
71. Kodya Palu	68,3	68,9	10,6	10,9	98,4	99,0	617,9	619,3	73,6	74,4	57	52	2,96
73. Sulawesi Selatan	68,7	69,2	7,0	7,2	84,6	85,7	616,8	618,3	68,1	68,8	23	23	2,35
01. Selayar	66,9	67,2	6,0	6,2	86,1	86,1	610,8	610,8	66,1	66,5	331	360	1,10
02. Bulukumba	70,6	70,7	6,2	6,3	85,2	85,2	614,4	618,7	68,4	68,9	237	250	1,49
03. Bantaeng	71,6	71,7	5,8	5,8	69,4	76,6	620,7	624,4	65,7	67,6	347	310	5,70
04. Jenepono	64,3	64,4	5,3	5,9	68,2	75,7	619,7	621,0	60,9	63,2	418	423	5,72
05. Takalar	67,5	67,7	5,3	6,2	73,3	80,1	618,3	619,6	63,7	66,1	394	373	6,73
06. Gowa	70,7	70,9	6,3	6,4	78,0	78,0	620,6	622,2	67,4	67,7	279	308	1,00
07. Sinjai	70,1	70,5	6,5	6,6	86,2	86,4	594,6	594,7	67,1	67,5	294	316	1,15
08. Maros	69,9	70,0	6,0	6,2	82,6	82,6	624,1	624,5	68,1	68,4	249	281	0,83
09. Pangkajene Kepulauan	68,0	68,1	6,2	6,3	84,5	84,5	617,0	617,5	67,1	67,2	293	328	0,34
10. Barru	67,4	67,6	6,8	7,2	85,2	87,7	619,1	621,5	67,5	68,6	276	267	3,40
11. Bone	68,0	68,2	5,7	6,2	81,3	84,8	621,2	624,6	66,3	67,8	328	301	4,60
12. Soppeng	71,2	71,2	6,5	6,5	83,1	83,6	620,6	622,8	69,0	69,3	212	231	1,17
13. Wajo	68,6	68,8	5,8	5,8	80,1	80,1	621,5	624,3	66,5	66,8	316	351	0,95
14. Sidenreng Rappang	69,7	70,8	7,2	7,2	86,6	86,6	618,1	619,2	69,3	70,0	197	199	2,19
15. Pinrang	70,6	70,7	6,9	6,9	89,1	89,1	621,1	622,8	70,3	70,5	157	182	0,66
16. Enrekang	72,7	73,7	7,2	7,4	84,2	85,3	617,2	617,8	70,4	71,4	153	147	3,36
17. Luwu	71,8	71,9	7,7	7,7	91,5	91,5	617,0	619,6	71,8	72,1	97	108	0,92
18. Tana Toraja	73,9	74,0	7,4	7,4	83,8	83,8	595,8	597,9	69,4	69,7	189	216	0,81
22. Luwu Utara	70,5	70,7	7,0	7,0	90,5	91,1	632,2	634,9	71,5	72,0	111	117	1,60
25. Luwu Timur	70,3	70,5	6,9	7,4	90,1	92,1	608,1	612,8	69,4	70,7	190	171	4,16
71. Kota Makasar	72,0	72,2	10,5	10,5	96,3	96,3	637,0	638,9	76,6	76,9	7	7	1,32
72. Kota Pare Pare	72,7	72,9	8,9	9,3	93,5	95,1	630,1	631,0	74,7	75,5	30	26	3,35
73. Kota Palopo	70,9	71,6	9,1	9,2	97,3	97,3	618,4	621,4	73,8	74,4	53	51	2,55

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
74. Sulawesi Tenggara	66,8	67,0	7,6	7,6	91,3	91,3	598,9	601,0	67,5	67,8	24	25	0,85
01. Buton	67,1	67,2	6,1	6,1	85,7	85,7	596,5	616,0	65,2	66,7	362	354	4,48
02. Muna	65,4	65,6	7,0	7,2	85,0	87,4	598,4	600,5	64,9	65,8	369	384	2,68
03. Konawe	66,0	66,2	7,6	7,6	94,0	94,0	587,9	588,4	66,8	67,0	308	337	0,61
04. Kolaka	65,6	66,1	7,7	7,7	93,1	93,1	617,8	623,9	68,8	69,6	220	218	2,52
05. Konawe Selatan	66,9	67,0	7,6	7,6	94,1	94,1	591,1	597,9	67,6	68,2	268	291	1,79
06. Bombana	66,7	66,9	5,9	5,9	85,3	85,3	585,0	585,8	63,8	64,0	391	416	0,56
07. Wakatobi	67,0	67,6	5,8	6,2	84,4	85,5	576,4	579,0	63,0	64,2	404	414	3,06
08. Kolaka Utara	65,4	65,0	7,4	7,4	92,3	92,3	604,0	608,1	67,2	67,3	288	323	0,27
10. Buton Utara		67,0		6,0		85,3		600,8		65,3		398	
09. Konawe Utara		65,9		7,0		93,8		587,7		66,3		368	
71. Kota Kendari	68,4	68,8	10,5	10,6	97,3	97,3	617,6	621,6	73,4	74,0	66	60	2,39
72. Kota Bau-Bau	69,0	69,2	8,8	9,4	93,8	95,0	591,9	593,1	69,7	70,6	182	180	2,86
75. Gorontalo	65,0	65,6	6,8	6,8	95,0	95,7	607,8	608,7	67,5	68,0	25	24	1,70
01. Boalemo	66,9	67,0	6,0	6,0	95,2	95,2	581,5	587,4	65,9	66,4	342	363	1,57
02. Gorontalo	66,7	66,8	6,4	6,4	93,4	94,4	595,6	597,7	66,8	67,2	306	326	1,23
03. Pokuwato	66,6	66,8	6,0	6,1	94,5	97,0	586,1	595,7	66,0	67,4	340	318	4,27
04. Bone Bolango	66,9	67,2	6,3	6,6	92,8	96,7	603,4	604,2	67,3	68,6	286	266	4,04
05. Gorontalo Utara		65,4		6,2		93,7		597,0		66,1		374	
71. Kota Gorontalo	65,0	65,9	9,3	9,3	99,1	99,1	609,5	615,6	70,4	71,3	154	150	3,09
76. Sulawesi Barat	66,4	67,0	6,0	6,3	83,4	85,9	616,3	619,4	65,7	67,1	29	29	3,90
01. Majene	63,8	64,1	7,0	7,3	89,2	93,8	624,2	627,3	66,9	68,6	298	268	5,04
02. Polewali Mamasa	63,5	63,9	5,6	5,8	81,3	81,3	615,4	618,5	63,3	63,9	400	420	1,62
03. Mamasa	70,5	70,7	5,8	6,4	81,1	83,2	618,0	621,2	67,5	68,7	277	262	3,79
04. Mamuju	67,4	67,5	5,8	6,3	82,7	88,8	609,3	610,5	65,4	67,3	355	324	5,55
05. Mamuju Utara	67,1	67,4	5,7	6,5	82,3	93,2	601,6	604,6	64,5	67,9	381	299	9,58
81. Maluku	66,2	66,6	8,5	8,6	98,0	98,0	597,3	599,3	69,2	69,7	17	17	1,46
01. Maluku Tenggara Barat	62,9	63,7	7,8	8,1	98,6	98,9	577,6	580,6	65,5	66,5	353	361	2,74
02. Maluku Tenggara	66,9	67,2	7,6	8,7	99,5	99,5	595,1	598,2	69,1	70,4	207	188	4,13
03. Maluku Tengah	64,6	65,2	8,1	8,1	98,6	98,6	591,4	594,5	67,7	68,3	260	282	1,78
04. Buru	66,1	66,3	7,2	7,2	92,8	92,8	588,6	591,7	66,4	66,7	323	353	1,09
05. Kepulauan Aru	66,8	66,9	7,5	7,5	98,8	98,8	587,4	590,5	68,3	68,5	244	270	0,89
06. Seram Bagian Barat	65,2	66,1	8,0	8,0	98,0	98,0	581,2	584,3	67,1	67,8	295	302	2,25
07. Seram Bagian Timur	64,6	65,0	7,6	7,6	97,7	97,9	560,8	563,8	64,8	65,3	370	395	1,43
71. Kota Ambon	72,3	72,4	10,9	10,9	98,2	98,6	619,7	623,0	76,2	76,6	13	10	1,66
82. Maluku Utara	64,2	64,8	8,5	8,6	95,2	95,2	590,3	592,1	67,0	67,5	27	27	1,70
01. Halmahera Barat	63,2	63,5	7,3	7,4	95,3	95,3	582,5	585,7	64,9	65,4	368	391	1,38
02. Halmahera Tengah	64,1	65,0	8,0	8,0	96,7	96,7	587,5	590,7	66,7	67,4	313	320	2,23
03. Kepulauan Sula	63,4	63,6	7,6	7,6	95,9	97,3	584,7	587,9	65,6	66,3	350	369	1,94
04. Halmahera Selatan	64,1	64,6	7,4	7,4	95,8	95,8	582,6	585,8	65,6	66,2	349	372	1,52
05. Halmahera Utara	63,6	64,6	7,6	7,0	95,9	95,9	584,3	587,5	65,7	66,0	348	376	1,04
06. Halmahera Timur	63,5	64,0	7,8	7,8	92,4	92,4	588,5	591,7	65,3	65,8	358	383	1,51
71. Kota Ternate	68,8	68,9	10,2	10,3	98,4	98,4	625,5	628,9	74,2	74,6	44	45	1,64
72. Kota Tidore Kepulauan	63,5	64,3	7,9	7,9	92,8	96,8	589,8	593,0	65,6	67,2	351	330	4,72
91. Papua Barat	66,9	67,3	7,2	7,2	85,4	88,6	584,0	588,0	64,8	66,1	30	30	3,54
01. Fak-Fak	69,0	69,1	7,9	8,4	95,9	96,0	568,8	571,5	67,7	68,3	261	283	1,86
02. Kaimana	68,8	68,8	7,1	7,1	91,2	91,2	581,3	584,0	66,9	67,1	303	335	0,69
03. Teluk Wondama	66,4	66,5	5,8	5,8	70,1	80,4	583,8	584,0	60,1	62,5	424	432	5,95
04. Teluk Bintuni	66,8	66,9	5,7	5,8	70,0	78,5	581,9	592,0	60,1	62,9	423	429	7,07
05. Manokwari	66,6	66,8	5,6	6,2	77,2	83,5	574,0	576,3	60,9	63,0	420	427	5,47
06. Sorong Selatan	65,5	66,0	7,0	7,0	87,9	87,9	566,5	572,7	63,1	63,9	403	419	2,11
07. Sorong	65,7	66,4	8,0	8,0	90,3	91,4	578,9	580,2	65,5	66,2	354	371	2,06
08. Raja Ampat	64,7	64,8	7,0	7,0	86,3	89,9	548,6	554,6	60,9	62,3	419	433	3,44
71. Kota Sorong	70,2	70,3	10,1	10,1	99,1	99,1	615,8	622,5	74,3	74,9	41	41	2,34
94. Papua	67,3	67,6	6,2	6,3	74,9	75,4	585,2	589,3	62,1	62,8	33	33	1,77
01. Merauke	61,4	61,9	6,7	7,0	86,3	87,1	582,6	587,3	61,5	62,5	414	431	2,70

IPM dan Komponen, 2005-2006

Propinsi Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Angka Melek Huruf (persen)		Pengeluaran Riil/Kapita d disesuaikan (Rp. 000)		IPM		Peringkat		Reduksi shortfall
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
02. Jayawijaya	65,6	65,7	2,4	2,8	31,9	47,2	569,8	583,7	47,6	52,4	435	450	9,30
03. Jayapura	66,4	66,6	7,6	8,0	92,8	93,6	598,1	605,6	67,5	68,8	273	258	3,75
04. Nabire	66,6	66,7	6,1	6,1	83,2	83,2	606,2	606,9	65,1	65,2	365	400	0,31
08. Yapen Waropen	65,7	66,0	6,4	6,5	86,0	86,6	620,2	621,7	66,4	67,0	321	339	1,67
09. Biak Namfor	65,1	65,4	7,9	8,0	96,5	96,6	585,2	586,1	66,9	67,3	297	325	0,96
10. Paniai	66,4	66,5	6,2	6,2	62,8	62,9	577,3	578,7	58,3	58,5	430	447	0,31
11. Puncak Jaya	66,4	66,6	6,1	6,1	86,4	86,8	619,2	620,7	66,7	67,0	312	338	0,95
12. Mimika	68,8	68,9	6,5	6,7	84,2	86,9	598,3	599,8	66,2	67,1	329	332	2,68
13. Boven Digoel	65,6	65,8	2,4	3,0	31,4	31,7	571,1	572,8	47,6	48,3	436	452	1,46
14. Mappi	65,2	65,4	2,2	2,8	31,2	31,3	569,9	573,9	47,0	48,0	439	455	1,73
15. Asmat	64,5	65,0	3,1	3,7	30,9	31,0	569,2	573,1	47,2	48,3	438	453	1,98
16. Yahukimo	65,2	65,7	2,4	2,4	31,7	31,8	570,1	574,1	47,4	48,0	437	454	1,12
17. Pegunungan Bintang	64,6	64,9	2,2	2,2	31,4	31,6	571,8	573,1	46,9	47,2	440	456	0,56
18. Tolikara	65,4	65,5	2,4	2,4	32,0	32,0	592,4	596,6	49,2	49,6	434	451	0,80
19. Sarmi	65,8	66,0	6,4	6,4	87,0	87,1	594,3	597,6	64,8	65,2	371	401	1,16
20. Keerom	66,2	66,4	7,3	7,3	90,9	91,1	593,4	597,3	66,5	66,9	320	342	1,43
26. Waropen	64,1	64,2	6,2	6,2	76,0	76,5	594,5	596,7	61,3	61,6	415	438	0,81
27. Supiori	64,8	65,0	7,7	7,7	93,5	94,1	584,2	585,8	65,9	66,2	344	370	1,00
71. Kota Jayapura	67,5	68,0	10,4	10,7	96,7	97,9	611,4	614,0	72,1	73,1	90	79	3,61
Indonesia	68,1	68,5	7,3	7,4	90,9	91,5	619,9	621,3	69,6	70,1			1,68